

DPRD Setujui Rp25 M Insentif Cegah Corona

- Kapolda Tindak Penyebar Hoax Virus
- Sekolah dan Pelabuhan Disemprot Disinfektan

PANGKALPINANG - Karena kalau kita bicara pengadaan harus berdasarkan standar harganya," ujarnya. Selain itu, Didit juga meminta kepada aparat terkait agar memperketat akses pintu masuk, baik melalui jalur darat, laut, dan udara agar dapat mendeteksi orang-orang yang keluar masuk wilayah Babel.

Ketua DPRD Babel, Didit Strigusjaya mengatakan, anggaran itu digunakan untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk antisipasi penanganan dan pencegahan dari virus tersebut.

"DPRD meminta dalam pembelian alat-alat tersebut melibatkan kejaksaan, kepolisian dan BPKP," kata Didit kepada sejumlah wartawan usai rapat pembahasan anggaran bersama eksekutif di Ruang Banggar DPRD Babel, Rabu (18/3/2020).

Hal tersebut dijelaskan Didit, bertujuan untuk mengawasi penggunaan anggaran yang transparan dan tepat guna.

"Yang jelas, DPRD minta anggaran 25 M ini segera action, sehingga kita bergerak untuk jangka dua bulan, dan kita melibatkan personel TNI, Polri untuk di lapangan, In Sha Allah apa yang diinginkan pemerintah daerah dan DPRD sudah kita follow up, tinggal action nya oleh eksekutif," jelasnya. ● ke Hal 11 Kol 5



Penyemprotan disinfektan di ruangan kelas salah satu sekolah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. (istimewa)

Musda Golkar Babel Deadlock, Masih Panas

- Panitia Pengarah Jawab Tudingan Peserta
- SC Dituding Ingin Jadi Pemain

PANGKALPINANG - Meski Musyawarah Daerah V Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Musda V DPD Golkar Babel) telah berakhir deadline pada Selasa dini hari (17/3/2020), namun situasi pascamusda terbilang masih panas. Sejumlah peserta Musda, Rabu pagi (18/3/2020) menggelar jumpa pers di Sol Marina Hotel dan menuding Panitia Pengarah (SC) Musda telah melakukan upaya menghilangkan status kesepertaan dari para pemilih suara. Selain itu, membantah ada dukungan ganda dalam reko-

mendasi bakal calon Ketua DPD I Golkar Babel. Namun tuduhan itu dibantah Ketua SC, Bustami yang menilai itu adalah upaya pembelaan diri dari peserta Musda. Terlebih, yang melayangkan tuduhan adalah sebelumnya juga pengurus DPD Golkar Babel, bahkan masuk dalam kepanitiaan Musda. Menurut Bustami, Panitia Pengarah tidak menghilangkan status kesepertaan dari para pemilih suara dengan cara tidak memperbolehkan peserta dan pemilih suara untuk registrasi, serta menghalangi masuk ruang s i d a n g. ● ke Hal 11 Kol 1

"Ini sifatnya di rancangan tatib dan semua orang organisasi sudah tahu kalian mau nulis apapun bisa di rancangan tatib. Nanti, pada saat paripurna, pleno akan kita perjuangkan di paripurna itu,"

Mantan Bendahara DPRD Kota Balik Penjara

- Terduga Korupsi Kasus Perpajakan
- Sempat Melarikan Diri

PANGKALPINANG - Mantan Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang, Budik Wahyudi yang sempat melarikan diri dan menghirup udara bebas akhirnya tertangkap. Boedik kini untuk kedua kalinya mulai dipenjara lagi oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Rabu (18/3/2020).

Demikian diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, RM Ari Priogung melalui Kasi Intel, Ryan Sumartha didampingi Kasi Pidrus, Eddowan kepada Rakyat Pos, Rabu sore. "Hari ini, kami ● ke Hal 11 Kol 1



Mantan Bendahara Kota Pangkalpinang, BW untuk kedua kali dieksekusi pihak Kejari Pangkalpinang ke lapas. (Bambang Irawan)

Di Belitung, 9 Orang Diduga Suspect Corona

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) H Marsidi Judono, Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung yang menjadi rujukan penyakit infeksi, telah merawat dan menetapkan sembilan orang yang diduga suspect Corona Virus Desaise atau yang disebut Covid-19.

Dari sembilan orang tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Sembilan orang itu empat orang pasien baru, yang masuk ke ruang Isolasi Rumah Sakit tersebut. Namun untuk pasien baru ini, semua berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Untuk pasien 06, masuk ke RSUD H Marsidi Judono Kabupaten Belitung pukul 23.50 WIB, Selasa (17/3/2020) tadi malam. Pasien 06 ini, berjenis kelamin perempuan dengan usia 58 tahun.

"Semua memang di isolasi, walaupun status mereka ODP, karena memang mereka mempunyai riwayat perjalanan, ditambah ada lagi klinis," jelas Direktur RSUD H Marsidi Judono Kabupaten Belitung Hendra kepada Rakyat Pos, Kamis (18/3/2020).

Sedangkan untuk pasien 07, masuk ke RSUD pukul 08.30 WIB tadi pagi. Pasien ini berjenis kelamin laki-laki dengan usia 66 tahun.

Untuk pasien 08, masuk pukul 09.00 WIB tadi pagi, berjenis kelamin laki-laki dengan usia 26 tahun.

"Untuk pasien nomor 09, ini masuk pukul 09.30 WIB tadi pagi juga, berjenis kelamin perempuan, dengan usia 48 tahun. Semua pasien ini adalah warga Belitung," ucapnya.

Semua pasien yang ada di RSUD Kabupaten Belitung, sekarang ini ada sembilan orang. Delapan orang di antara pasien tersebut, secara keseluruhan di isolasi, dan hanya pasien nomor 02 yang dipulangkan.

Sebelumnya, dalam satu hari Direktur RSUD H Marsidi Judono Kabupaten Belitung Hendra mengatakan, untuk pasien kategori pasien dalam pengawasan (PDP) kini sudah bertambah.

Ada tiga orang pasien baru yang sekarang berstatus suspect dan sudah berada diruang isolasi rumah sakit. Sehingga untuk jumlah pasien suspect ini, secara keseluruhan berjumlah lima orang.

Namun dari lima pasien tersebut, satu di antara nya yaitu pasien rujukan dari Belitung Timur, kini sudah dipulangkan, lantaran kondisinya sudah mulai membaik. Status dari pasien ini yaitu Orang Dalam Pemantauan (ODP). Untuk pasien tersebut senin kemarin sudah dipulangkan pukul 14.00 WIB.

"Sekarang sudah bertambah tiga ● ke Hal 11 Kol 5

Dua Lokasi Pantai Ditemukan Mayat

- La Nurdin Meninggal dalam Perahu
- Jasad Ratmin Tergeletak di Pantai Penyak



Evakuasi korban yang ditemukan dipinggir Pantai Penyak Kecamatan Koba Bangka Tengah, Rabu siang. (M Tamimi)

BELINYU - Sebuah kapal motor mesin ditemukan ke arah pantainya di atas karang tepi Pantai Pejem, Dusun Pejem, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Rabu (18/3/2020) siang.

Penemuan ini kemudian mengagetkan warga karena dalam perahu itu terdapat seorang pria telah dalam kondisi tak lagi berwujud.

Kades Gunung Pelawan, Tjung Kim, mengatakan kapal dan sesosok mayat tersebut pertama kali ditemukan warganya Mila seorang ibu rumah tangga, kemudian meneruskan informasi ke warga lain hingga sampai ke Kadus Pejem Utara.

"Informasi dari Bu Mila kemudian disampaikan ke Pak Kadus lalu ke saya. Kemudian Pak Kadus dan Bhabin-kamtibas langsung turun ke lokasi yang ternyata di dalam perahu tersebut ada sesosok mayat," kata Tjung Kim saat ditanyakan wartawan, kemarin.

Dikatakan Tjung Kim, setelah dipastikan kebenarannya informasi diteruskan olehnya kepada Camat Belinyu guna menyampaikan lanjut ke Kepala BPBD Bangka.

Tak lama BPBD Bangka meneruskan tim reaksi cepat termasuk personel dari relawan Laskar Sekaban, Polsek Belinyu, Lanal Babel ● ke Hal 11 Kol 1

DPRD Setujui Rp25 M Insentif Cegah Corona Awass kena virusnya
Panas di Musim Hujan, Tanda Kemarau Lebih Panjang Cukup efektif turunkan grafik kepanikan corona

Dukcapil Basel Stop Layani Rekam Data

TOBOALI - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Selatan telah menghentikan perekaman data administrasi kependudukan hingga dua pekan kedepan. Kepala Dinas Dukcapil Basel Benny Supratma mengatakan penyetopan rekam data ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona khususnya di Disdukcapil. Menurut Benny, Dukcapil adalah salah satu

kantor pelayanan publik yang tak kurang 100 orang dalam sehari datang ke kantor untuk mengurus administrasi kependudukan. "Kita menindaklanjuti surat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Basel sudah menyetop rekam data hingga tanggal 30 Maret mendatang, ini salah satu antisipasi penyebaran virus corona, karena memang kita pelayanan ● ke Hal 11 Kol 1

Kepedulian adalah salah satu benteng utama dari serangan narkoba.
Bersama kita lawan narkoba.

Bnn Pangkalpinang
pangkalpinangkota.bnn.go.id
info@bnpmpangkalpinang
Call Center: 08117111660

Bebas Dehidrasi Dengan Air Putih

Customer Care :
☎ 0851 0000 0111
☎ 0852 8949 6949

BANK SUMSELABEL

Cab. Pangkalpinang	: Feni Naviri	081272158383
Cab. Sungailiat	: Jose Arfian	082122451876
Cab. Koba	: Isfian	085268961976
Cab. Muntok	: Sukra Noviar	085377166426
Cab. Toboali	: Hersan Pandhu P	081367536804
Cab. Tanjungpandan	: Apdi Suhelman	082178499311
Cab. Manggar	: Oiky	087901741780

http://www.banksumselbabel.com

MAU BAYAR TAGIHAN AIR PDAM TIRTA PINANG ??
di **BANK SUMSELABEL**

1. Teller
2. ATM
3. SMS Banking
4. Internet Banking

-BUNGA MURAH
-PROSES CEPAT & MUDAH
-JANGKA WAKTU PANJANG
-BEBAS BIAYA*

KSG
Kredit Serba Guna
PNS
PRA Pensiun & Pensiun

1500711



Pegawai sekretariat memeriksa suhu tubuh anggota DPRD Babel dengan alat thermal scanner, Rabu (18/3/2020), (foto: Roni Bayu)

Pulang DL, Suhu Anggota Dewan Diperiksa

PANGKALPINANG - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada anggota dewan yang baru pulang dinas luar (DL), Rabu (18/3/2020). Tidak hanya itu pemeriksaan juga dilakukan kepada setiap ASN maupun honorer yang ada di lingkup DPRD Babel.

"Sesuai dengan arahan ketua bahwa kawan-kawan pulang dari dinas luar dan staf khususnya pendamping kemarin masuk kantor di skrining, periksa suhu tubuh, karena untuk menghindari danantisipasi penyebaran covid-19, mengingat mereka baru pulang dari luar daerah," kata Sekretaris DPRD Babel, Syaifuddin di ruang kerjanya.

Namun begitu, dia berharap, semua anggota dewan dan staf pendamping yang baru pulang dari dinas luar dalam keadaan sehat. "Semua tadi ada 11 anggota dan staf yang telah diperiksa rata-rata sehat, semua dengan suhu badan yang masih normal diangka 36 derajat celsius, kita masih menunggu anggota lainnya yang akan ngantor sari," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, salah seorang anggota DPRD,

Dody Kusdian mengaku sangat mendukung kebijakan yang dilakukan Sekretariat DPRD Babel mengingat penyebaran virus corona sudah mulai mewabah di Indonesia. "Perantara itu adalah mobilitas penduduk, salah satunya anggota DPRD, sehingga memang perlu adanya pemeriksaan ini," jelas Dody.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan ikut mendukung instruksi dari Gubernur Babel, Erzaldi Rosman yang mengimbau untuk tidak melaksanakan DL untuk sementara waktu, apalagi disampaikan dia, anggota DPRD Babel harus menjadi contoh bagi masyarakat.

Waspada Saat DL
Senada dengan Dody, anggota DPRD Babel Johansen Tumanggor mengaku, selalu waspada terhadap penyebaran virus corona atau covid-19 yang saat ini telah merebak di berbagai negara penjurut dunia termasuk di Indonesia.

Apalagi dijelaskan dia, sebagai anggota dewan yang sering melakukan kunjungan kerja atau dinas luar (DL) kota, sangat rentan terpapar virus corona terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya.

"Kita memang mengikuti sesuai imbauan pemerintah

ketika melakukan DL ke Jakarta," kata Johansen usai pemeriksaan suhu tubuh.

Politikus Partai Nasdem ini mengungkapkan, pada saat DL dirinya menghindari tempat-tempat keramaian dan selalu menggunakan masker terutama di ruangan yang tertutup. "Kemudian saya lihat di fasilitas umum semua di Jakarta kemarin sudah tersedia untuk cuci tangan (hand sanitizer-red) itu, kita betul-betul gunakan ketika masuk dalam gedung," ujarnya.

"Selain itu, hindari juga kalau masih memungkinkan angkutan umum, kita kemarin menghindari menggunakan mobil rental supaya benar-benar aman dari corona ini," tambahnya.

Kendati demikian, disampaikan dia, hal yang paling penting dalam mengantisipasi virus ini adalah kesadaran pribadi untuk menerapkan pola hidup sehat.

Lebih lanjut, disampaikan dia, sampai saat ini Fraksi Nasdem belum mendapatkan instruksi dari pimpinan DPRD mengenai penundaan jadwal DL. "Tetapi kami mengikuti arahan dari kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan dewan, kalau sudah ada mengarahkan, saya rasa kami pasti mengikutinya," ujarnya. (ron/10)

Cegah Covid-19 OJK Minta Perbankan Lakukan Penyesuaian

PANGKALPINANG - Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Minggu (15/3/2020) dalam rangka meminimalisir risiko teresbarnya Corona Virus Disease (Covid-19), perlu dilakukannya tindakan serentak oleh instansi pemerintah, lembaga negara termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait lainnya. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo mengatakan sesuai kewenangan OJK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan maka agar kebijakan pengendalian Covid-19 efektif, OJK meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional.

"OJK meminta pengaturan mengenai alternatif bekerja dari

rumah diserahkan kepada masing-masing Self Regulatory Organization di Pasar Modal, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan," kata Anto dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (18/3/2020).

Tak hanya itu, perbankan juga diminta meningkatkan kebersihan lingkungan kerja dan sarana pelayanan publik seperti ATM, loket bank dan lain sebagainya. "Menunda seluruh perjalanan keluar kota dan atau luar negeri, khususnya ke tempat yang sudah diidentifikasi terdapat penyebaran virus Covid-19 sesuai dengan data dan informasi terkini dari Kementerian Kesehatan," imbuhnya.

Selain itu, menurut dia, tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang baik

PENGUMUMAN

Penghentian Sementara Layanan Konsumen Kontak OJK 157 melalui Walk-In (Layanan Kunjungan Langsung) untuk meminimalisir risiko penyebaran virus Covid-19

Layanan Kontak OJK 157 tetap dapat diakses melalui:

- ☎ 157
- ✉ Konsumen@OJK.go.id
- ☎ 081-157-157-157

#Pangkalpinang #Babel #Pangkalpinang #Pangkalpinang #Pangkalpinang #Pangkalpinang

internal dan atau eksternal dalam bentuk sosialisasi, rapat dan event lainnya. "Interaksi kiranya dil-

akukan melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi," ujar Anto. (nov/18/10)

Panas di Musim Hujan, Tanda Kemarau Lebih Panjang



Mikron Antariksa

PANGKALPINANG - Kalahar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Mikron Antariksa, menyebutkan saat ini meskipun musim hujan namun diselingi dengan cuaca panas. Adanya cuaca panas di musim hujan ini, menurut dia, menandakan bahwa musim kemarau nantinya akan berlangsung lebih lama.

"Babel sebetulnya belum masuk musim kemarau, kita

masih musim hujan, tetapi ada hari tanpa hujan atau panas. Ini menandakan musim panas berlangsung lama ditandai jarangnya hujan di musim hujan," kata Mikron kepada wartawan, Rabu (18/3/2020).

Hal ini, kata dia, patut diantisipasi, misalnya dengan tidak membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan dan lainnya. "Kita perlu antisipasi, terutama resapan air yang sampai saat ini banyak daerah sum-

ber air yang airnya belum bertambah, jika kemarau lebih cepat, otomatis akan mempengaruhi sumber air," tandasnya.

Seperti di Kolong Spritus, Air Itam yang saat ini kondisi air belum bertambah pasca kemarau tahun lalu. Dengan intensitas hujan yang ringan pun, sebetulnya air juga belum bertambah. "Mudah-mudahan kita lebih siap menghadapi kemarau," pungkasnya. (nov)

BNN Rehab Empat ASN Tersandung Narkoba

PANGKALPINANG - BNN Kota Pangkalpinang akan merehab empat ASN Pemkot setempat yang diamankan pada Senin (16/3) siang ke Lido Bogor dalam waktu dekat. Kepala BNN Kota Pangkalpinang, AKBP Ichlas Gunawan, Rabu, mengatakan berdasarkan hasil dari tim assesment terpadu, keempat ASN tersebut masuk dalam kategori pecandu narkoba.

"Berasarkan pemeriksaan dari tim dokter, mereka sudah masuk pada candu. Di mana mereka mulai menggunakan narkoba ada yang sejak 2015 dan 2016. Sehingga wajib direhabilitasi yang rencananya di Lido Bogor," katanya.

la menyebutkan tim assesment terpadu yang menangani kasus ini terdiri dari tim medis yaitu dokter dan psikolog, serta tim hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan BNN.

"Tugas dari tim media ini melihat sejauh mana ketergantungan mereka termasuk karakternya. Sedangkan tim hukum, melihat aspek apakah masuk jaringan atau tidak," katanya.

la mengatakan, keempat ASN ini akan menjalani rehabilitasi inap minimal 6 bulan, karena mereka sudah masuk kategori candu yang menjalani perawatan secara maksimal.

"Untuk rehabnya di Lido akan kami lakukan secepatnya. Saat ini sedang koordinasi, kalau bisa besok, karena lebih cepat lebih bagus untuk mereka," ujarnya.

terkait dengan ditangkapnya empat ASN tersebut, Dirinya mengimbau kepada masyarakat terhususnya aparat agar jangan menggunakan narkoba karena merusak moral dan bangsa.

"Hidup sehat saja, apalagi kalau pegawai karirnya bisa naik terus. Apalagi sekarang ini mau mendaftar apapun, kebanyakan harus ada surat keterangan bebas narkoba," ujarnya.

Sebelumnya BNN Kota Pangkalpinang berhasil mengamankan sebanyak empat aparat sipil negara (ASN) Pemkot Pangkal Pinang usai melakukan pesta sabu di kawasan Jalan Sudirman pada Senin (16/3/2020) siang.

Empat ASN yang diamankan tersebut masing-masing bernisial HA, JU, JO, HE. Di mana salah satunya merupakan Sekretaris Camat Pangkalpinang. (antara)



Penyusunan RKPD 2021 Tetap Berjalan



►► Bappeda Siapkan Virtual Meeting

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berupaya dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. Upaya ini tetap mengedepankan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada publik tetap berjalan.

Menurut Sekretaris Bappeda Kepulauan Babel, Joko Triadhi, tahap penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2021 tetap berjalan. Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan akhir RKPD harus diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei.

"Saat ini belum ada konfir-

verifikasi, dan musrenbang tanpa perlu berkumpul dalam satu ruangan. Cukup di meja kerja masing-masing dengan perangkat kerja atau smart-phone," ungkapnya.

Kantor Bappeda Babel juga sudah menyiapkan sarana pencegahan penyebaran virus Covid-19. Sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Babel Nomor 440/1037/VII Tanggal 16 Maret 2020, perangkat daerah diminta untuk menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, alat pengukur suhu, dan alat-alat kesehatan.

"Di kantor bappeda sudah disiapkan beberapa tempat untuk mencuci tangan, salah satunya kita tempatkan di depan pintu masuk kantor, kita lakukan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kerja," ungkapnya.

Joko juga meminta ASN untuk dapat ikut menjaga stabilitas di masyarakat, salah satunya dengan tidak memborong sembako. "Kita berharap cobaan ini cepat berlalu dan selalu berdoa agar kita, keluarga, dan kerabat kita selalu dilindungi oleh Allah Swt serta diberi kekuatan dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat," ungkapnya. (antara)



Salah satu pegawai DPMD saat membersihkan ruangan kantor di Pangkalpinang, Rabu (18/3/2020), (foto:antara)

Pegawai DPMD Bersih-bersih Kantor Cegah Corona

PANGKALPINANG - Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sigap mewaspadai mewabahnya virus Corona atau Covid-19.

Seluruh pegawai menggelar bersih-bersih kantor termasuk peralatan di dalamnya sebagai upaya antisipasi pencegahan Virus Corona.

Pembersihan dilakukan de-

ngan mengelap peralatan kerja pegawai seperti meja, kursi, dan peralatan lainnya yang menjadi media penularan wabah corona.

Selain pembersihan kantor berikut peralatan kerja, para pegawai juga diarahkan untuk rutin mencuci tangan dengan sabun, bahkan saat memasuki kantor. Hal ini mengikuti himbauan dari Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman. (antara)

PENGUMUMAN

Telah diserahkan seorang anak berjenis kelamin laki laki usia 6 tahun yang lahir dibantu seorang Bidan di Pangkalpinang pada tanggal lahir 27 Agustus 2013 dari seorang ibu kandung. Dihimbau kepada orang tua kandung atau keluarga agar dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Bangka untuk informasi lebih lanjut.

KEHILANGAN

TELAH HILANG Surat Tanah. Dengan luas tanah ± 5.775m2 yang terletak di Jalan Raya Penyak Kelurahan/Desa Penyak Kecamatan Koba. Atas nama: Hasim Muhamad. Alamat: Desa Penyak.

Petani Jangan Fokus Satu Komoditi

Elius Gani



anjurkan selain sahang, bisa juga diselingi menanam cabai, sayur dan sebagainya," ungkap Elius.

Dia menambahkan seperti yang dialami oleh beberapa petani ubi kasesa yang ada di Kabupaten Bangka dimana saat ini masih kesulitan untuk mencari pembeli karena beberapa pabrik tutup.

"Pabrik ubi (yang ada-red) di kita ada tiga, satu di Pudingbesar, satu lagi di Desa Cit tapi sering rusak dan satu lagi di Kenanga namun untuk sekarang tutup sementara," tambahnya.

Dengan tutupnya pabrik tapioka di Kenanga, ditambahkan dia, membuat petani ubi kasesa harus menjual ke pabrik yang ada di Pudingbesar.

"Sekarang cuma itu (pabrik di Puding-red) yang masih beroperasi, jadi mungkin nanti akan kewalahan juga. Petani juga mau tidak mau harus jual kesana karena ke Lampung pasti akan lebih murah karena dipotong biaya transportasi," jelas Elius.

Untuk itu, ia meminta para petani harus pintar mencari komoditi yang lebih prospek kedepannya sehingga dapat membantu kesejahteraan para petani itu sendiri. "Kami sifatnya hanya mensupport, tapi petani lebih tau komoditi apa yang punya prospek bagus. Intinya jangan cuma fokus satu komoditi saja," tegasnya. (mla/10)

- ▶▶ Harga Anjlok Dipastikan Merugi
- ▶▶ DPP Sarankan Tanam Cabai dan Sayur

SUNGAILIAT - Dinas Pangan dan Pertanian (DPP) Kabupaten Bangka mengajak kepada para petani di daerah itu untuk tidak mengandalkan satu komoditi saja. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penurunan harga yang dapat merugikan petani.

Kepala DPP Bangka, Elius Gani kepada wartawan, Rabu (18/3/2020) mengatakan saat

ini masih banyak petani yang hanya fokus bertanam satu komoditi saja. Dia menyarankan petani menanam cabai, sayur dan komoditi lainnya.

"Jika hanya satu komoditi saja karena jika harganya anjlok, petani juga akan rugi. Misalnya petani sahang (lada-red), mereka harus terima kalau harganya tidak sesuai dengan biaya perawatan. Makanya kita

Bentuk Desa Bersinar Butuh Komitmen



ia menambahkan, untuk membentuk Desa Bersinar diperlukan semangat dan komitmen yang besar di desa tersebut antara pemerintah desa dan masyarakat setempat.

"Saya berharap pengiat antinarkoba, aparat desa dan masyarakat Desa Jurung untuk mempersiapkan diri dalam pencaangan pembentukan Desa Jurung sebagai desa bersih dari narkoba," ujarnya.

Dia menilai, menilai pemerintah desa setempat cukup serius menginginkannya ditetapkan sebagai desa yang bersih dari narkoba.

"Saya memberikan apresiasi besar kepada pihak pemerintah dan masyarakat Desa Jurung serta pihak stakeholder lainnya, yang mempunyai semangat besar untuk membersihkan desa bersih dari narkoba," katanya.

Sementara Kepala Desa Jurung, Firdarozzi mengatakan, dipilihnya desanya sebagai proyek pengembangan program desa "Bersinar" merupakan suatu langkah positif bagi pemba-

ngunan masyarakat desa.

"Suatu penghormatan bagi kami yang telah kepercayaan Desa Jurung sebagai pengembangan program desa Bersinar mengingat tidak semua desa atau kelurahan mendapat kepercayaan yang sama," katanya.

Menurut dia, wacana dan dukungan pembentukan Desa Bersinar di Desa Jurung merupakan sebuah inisiatif dari pengiat antinarkoba yang berasal dari desa tersebut.

"Pengiat tersebut merupakan pegawai di Pemesdes Jurung yang sangat aktif dalam melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)," katanya.

Ada dua warga di desanya yang menjadi pengiat antinarkoba dan keduanya sudah mendapatkan bimbingan teknis dari BNNK Bangka.

Para pengiat dibekali dengan pengetahuan tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (ant)



Pengunjung antri untuk mengunjungi warga binaan di Lapas Sungailiat, Rabu (18/3/2020). (foto: Riski Yulandri)

Antisipasi Corona Kunjungan ke Lapas Sungailiat Diperketat

SUNGAILIAT - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Sungailiat memperketat pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung sebagai tindakan pencegahan virus corona atau covid-19 di kawasan lapas.

Kepala Lapas Sungailiat, Akhyar yang diwakili Kasi Pembinaan, Al Ihsan mengatakan pihaknya selalu menganjurkan seluruh pengunjung untuk melakukan cuci tangan terlebih dulu sebelum masuk ke dalam lapas.

"Setiap pengunjung harus cuci tangan dulu sebelum masuk, setelah berkunjung juga cuci tangan lagi. Kita sudah siapkan wastafel didalam dan diluar juga," ungkap Al Ihsan, Rabu (18/3/2020).

Selain itu, menurut dia, petugas pemeriksaan juga dilengkapi dengan sarung

tanang agar lebih aman saat melakukan tugasnya yang selalu melakukan kontak dengan pengunjung.

"Petugas pemeriksaan kita juga dilengkapi sarung tangan karet agar tidak kontak langsung dan mengantisipasi tertularnya virus corona ini. Kita sudah mensosialisasikan terkait virus ini kepada seluruh warga binaan kita," terang Ihsan.

Pihak lapas, dia menambahkan, juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap pegawai setiap pagi yang dilakukan oleh petugas medis.

"Kita ada alat pendeteksi suhu tubuh jadi setiap pagi diperiksa untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Ini rutin kita lakukan sejak beberapa hari kebelakang," tambahnya.

Sementara itu, petugas medis lapas, Budi juga mengatakan pihaknya rutin melakukan kontrol ke setiap blok yang ada untuk melihat kondisi warga binaan.

"Jika memang gejala, maka langsung kita cek suhu tubuhnya, jika memang panas maka langsung kita rujuk. Sejuah ini belum ada tanda dan gejala warga binaan kita yang terindikasi," terangnya.

Pihaknya juga meminta seluruh warga binaan di Lapas Sungailiat untuk menjaga kebersihan dan selalu menjemur baju minimal dua jam di bawah sinar matahari.

"Setiap kali menerima kunjungan, kita minta warga binaan ini langsung ganti baju dan jemur baju yang dipakai sebelumnya, bila perlu langsung cuci," tambah Budi. (mla/10)

YAMAHA
RACING
DESAIN KUALITAS DAN PERFORMAN

WRR 155R

THE REAL ADVENTURE PARTNER

CV. SUMBER JADI
NEW PRODUCT

BOOKING ONLINE
2 Desember 2019 - 31 Januari 2020

DAPATKAN THE REAL ADVENTURE PACKAGE

SWART DAN KERTUTAN BELANG

UNTUK INFORMASI DETAIL PRODUK SILAHKAN KUNJUNGI
WWW.YAMAHA-MOTOR.CO.ID/PRODUCT/WRR155R

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI:
CV. SUMBER JADI
JL. MASJID JAMIK NO. 27
PANGKALPINANG
TELP. : (0717) 431-515

Mulkan Harap Masyarakat Tanamkan Rasa Cinta Lingkungan

SUNGAILIAT - Bupati Bangka, Mulkan mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah hingga masyarakat dapat menanamkan rasa cinta lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik, hingga tidak membuang membuang sampah sembarangan.

"Kita harus mengurangi sampah dengan mengurangi penggunaan plastik, karena sampah itu timbul karena perbuatan kita sendiri pada dasarnya," kata Mulkan belum lama ini.

Dia mengatakan upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya melahirkan kerajinan rumah tangga sehingga barang yang berdaya guna kembali. "Mari kita biasakan anak didik kita membuat kerajinan dari sampah," imbunya.

Untuk itu orang nomor satu di Kabupaten Bangka ini berharap, seluruh stakeholder dapat bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Bangka yang asri dan bebas dari sampah



yang bertebaran tidak pada tempatnya.

"Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Kepada camat, lurah dan kades silahkan sosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan," katanya. (ant)

Pegawai Pemkab Babar Disosialisasikan Cara Cegah Covid-19



►► Bagikan 100 Masker ke Pegawai

MUNTOK – Para pegawai PNS maupun PHL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Babar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diberikan sosialisasi cara mencegah penyebaran Virus Corona atau

Covid-19, oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangka Barat (Babar) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Babar. Sosialisasi berlangsung di Rabu (19/3/2020) sejak Pukul

07.30 hingga 08.15 Wib di Lapangan Apel Timur Kantor Bupati Babar itu, dipimpin langsung oleh Ketua PMI Babar, dr Hendra.

Dihadapan Pegawai Pemkab Babar Ketua PMI Babar yang juga menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Babar menjelaskan

apa itu Covid-19, dan bagaimana cara mencegah penyebarannya, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, batuk dan bersin sesuai prosedur yang benar.

Ketua PMI Babar berharap agar seluruh Pegawai Pemkab Babar dapat melakukan pola hidup bersih dan sehat, jangan panik dan takut berlebihan dalam menghadapi masalah covid-19 yang merupakan virus mematikan ini.

Hendra mengimbau kepada para Pegawai Pemkab, apabila ada yang sakit atau keluarganya yang sakit, segera ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

Wahyu salah seorang Pegawai Pemkab Babar, mengaku senang dan berterima kasih kepada PMI dan Dinas Kesehatan Babar yang telah memberikan pemahaman kepada dirinya dan Pegawai Pemkab Babar bagaimana caranya mencegah penyebaran virus corona.

Selesai Sosialisasi, PMI dan Dinkes Babar membagikan 100 pcs masker kepada para Pegawai Pemkab Babar yang mengikuti sosialisasi saat itu. (rel/3)

PT Timah Serahkan Bantuan ke PGSI Bangka Barat



Athlet Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Bangka Barat menerima bantuan dari PT Timah di Guest House Unmet Mentok. (foto: hendra).

MENTOK – PT Timah Tbk menyerahkan bantuan ke Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Rabu (18/3/2020) di Guest House Unmet Mentok.

Bantuan Dana CSR itu, akan dipergunakan PGSI dalam rangka mengikuti festival kejuaraan junior internasional di Padang Sumatera Barat 9 April mendatang.

PGSI Bangka Barat dipercaya mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kancah internasional. Turut hadir GM PT Timah wilayah Bangka

Ahmad Syamhadi, Wakil Kepala unit laut Bangka Wijaya, Kepala Unmet Wiyono, Sekretaris Diknaspora Amrullah, Ketua KONI Bangka Barat HM Amin, Ketua Pengcab PGSI Agung Dwi Handes, Sekretaris Unmet Suryadi, Wakil Ketua Koni Dedi Wijaya serta pengurus PGSI dan atlet yang akan bertanding, dalam acara penyerahan bantuan tersebut.

Ketua Pengcab PGSI Agung Dwi Handes mengucapkan terima kasih kepada PT Timah atas respon cepat dan kepeduliannya terhadap olahraga.

Untuk bertanding pada tingkat nasional maupun internasional pengcab selalu terkendala dana padahal tingkat keberhasilan prestasi atlet itu ada pada pertandingan nasional dan internasional. “Terima kasih kepada PT Timah, atas respon cepat dan bantuannya,” ucap Agung.

Sekdin Diknaspora Amrullah juga mengucapkan terima kasih kepada PT Timah yang telah membantu PGSI. Pihaknya berharap sinergitas antara Pemkab dengan PT Timah terus ditingkatkan. Sementara Kepala Unmet

PT Timah Tbk Wiyono mengatakan menyalurkan CSR merupakan kewajiban PT Timah di wilayah operasinya. Dirinya mohon doanya agar produksi timah terus meningkat sehingga dana CSR semakin meningkat.

Dia juga mohon maaf setiap proposal belum bisa disetujui sepenuhnya begitu juga nilainya. Hal itu harus berbagi dengan yang lainnya. “Kami sebagai perusahaan negara tentunya ingin berbuat untuk kemajuan daerah, doakan agar produksi kami terus meningkat,” kata Wiyono. (wan/3).

Bandara Hanandjoeddin Terima Surat Pembatalan Penerbangan Malaysia-Belitung

BELITUNG – Bandara Internasional HAS Hanandjoeddin Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menerima surat pembatalan penerbangan rute Kuala Lumpur (Malaysia) - Tanjung Pandan (Belitung) sebagai dampak COVID-19.

Plt Executive General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Nanang Novianto Sapudro di

Tanjung Pandan, Babel, Rabu (18/3/2020) mengatakan, pembatalan penerbangan tersebut dari maskapai AirAsia rute Kuala Lumpur-Tanjung Pandan.

“Kalu tanggal 18 Maret atau hari ini masih ada, dan ini adalah penerbangan yang terakhir untuk rute Kuala Lumpur-Tanjung Pandan,” ujarnya. Ia menjelaskan, penerbangan yang dibatalkan tersebut adalah penerbangan maskapai

AirAsia rute Kuala Lumpur-Tanjung Pandan nomor penerbangan QZ 246 berangkat pada 03.00 UTC dan tiba pada 04.45 UTC.

Selanjutnya adalah penerbangan AirAsia rute Tanjung Pandan-Kuala Lumpur nomor penerbangan QZ 247 berangkat pada 05.10 UTC dan tiba 06.55 UTC. “Pembatalan ini efektif terhitung mulai tanggal 20-31 Maret,” ujarnya.

Nanang menambahkan, hal ini terjadi akibat merebaknya wabah COVID-19 dan sudah banyak negara yang terjangkit akibat wabah tersebut, serta adanya pembatasan bepergian ke luar negeri baik yang dilakukan Pemerintah Malaysia maupun Indonesia.

“Ini hanya untuk rute penerbangan AirAsia rute Kuala Lumpur-Belitung, tetapi kalau rute lainnya seperti Tanjung Pandan-Jakarta masih,” tambahnya. (ant/3).

Penyesuaian NJOP Kabupaten Belitung Sesuai UU

TANJUNGPANDAN – Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Belitung telah disesuaikan sejak tahun 2019 lalu. Penetapan NJOP yang baru tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring dengan penyesuaian NJOP tersebut, maka berpengaruh pada pengenaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Iskandar Febro menjelaskan, dalam penetapan NJOP baru tersebut Pemkab Belitung bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSE-KP) UGM pada tahun 2016.

Selain itu, Pemkab Belitung juga mencari perbandingan dengan melalui kunjungan kerja ke Kabupaten Banten dan Kota Magelang sebelum ditetapkan penyesuaian NJOP pada tahun 2019.

“Kita juga koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan di Jakarta. Jadi dalam penyesuaian NJOP ini sudah melalui prosedur dan mekanisme yang benar dan lamanya proses disertai dengan dilakukannya suatu kajian dan analisa memakan waktu tiga tahun dari 2016 hingga 2018,” jelasnya Iskandar

Febro kepada Rakyat Pos, Rabu (18/03/2020).

Dia mengatakan, penyesuaian NJOP seharusnya dilakukan setidaknya 3 tahun sekali seperti dalam Pasal 79 UU No 28 Tahun 2009. Sedangkan NJOP sendiri salah satu faktor penentu dalam BPHTB dan PBB.

“Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,” kata Iskandar Febro.

Kenaikan NJOP di Kabupaten Belitung dirasa sesuai dengan seiring makin meningkatnya investasi. Kemudian pariwisata juga mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan.

“Dengan bertambahnya investasi menyebabkan nilai jual lahan semakin tinggi dari harga-harga sebelumnya. Terkait dalam hal lahan sangat mempengaruhi dalam penetapan penyesuaian NJOP,” papar Iskandar Febro.

Iskandar menyebutkan, PAD yang diterima Pemerintah juga digunakan dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Dengan sendirinya PAD tersebut untuk pembiayaan pembangunan hingga percepatan pembangunan daerah bisa terwujud. (dodi/3)

Dansat Agar Senantiasa Tumbuhkembangkan Budaya Interaksi

NAMANG – Dan/Kasatbak Rem 045/Gaya mengikuti Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD Tersebar Kodam II/Swj TA 2020 melalui video conference (vicon), yang dipimpin oleh Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan di Ruang Data Korem 045/Gaya, Rabu (18/3/2020).

Apel Dansat ini bertepatan dengan Apel Dansat Tersebar Kodam II/Swj TA 2020, Kita Tingkatkan Kemanunggalan TNI & Rakyat dalam Mewujudkan Sinergitas & Netralitas TNI di Wilayahah.

Para Dansat agar senantiasa menumbuhkembangkan budaya interaksi & komunikasi, baik dengan anggota di satuan maupun dengan komponen masyarakat di lingkungan tugasnya.

terwujudnya satuan yang siap operasi.

Selain itu, ia juga menyampaikan, sasaran yang ingin dicapai pada Apel Dansat ini untuk meningkatkan pemahaman tentang kepemimpinan lapangan, terwujudnya pemahaman terhadap pokok-pokok kebijakan Pimpinan TNI AD, terwujudnya ide/pemikiran baru dalam pencapaian tugas pokok, meningkatnya kepedulian & moralitas, serta meningkatnya peran & profesionalitas Dansat dalam tiap pelaksanaan tugas.

Para Dansat agar senantiasa menumbuhkembangkan budaya interaksi & komunikasi, baik dengan anggota di satuan maupun dengan komponen masyarakat di lingkungan tugasnya.

Terakhir, Pangdam berpesan agar kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh semangat & kesungguhan, bangun komunikasi yang harmonis, sehingga terjalin silaturahmi yang baik, guna mewujudkan solidaritas & solidaritas di lingkungan Kodam II/Swj untuk diteladani semua Prajurit.

Untuk itu Pangdam juga mengharapkan tema yang diusung tersebut bisa menjadi spirit & pendorong para Dansat untuk terus memperkokoh komitmen dalam melakukan pembinaan satuan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.

Apel ini diikuti oleh para Danrem, para Dan/Kabalad, para Dandim, para Dansat, para Danm, para Danm, Danramil kesatuan jajaran Kodam II/Swj. (bia/3).

Laboratorium DLH Belitung Produksi Cairan Pembersih Tangan

BELITUNG – Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memproduksi cairan pembersih tangan (hand sanitizer) guna mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Belitung, Dedy Suprpto di Tanjung Pandan, Rabu mengatakan, pembuatan cairan tersebut disebabkan kelangkaan di sejumlah apotik di daerah itu.

“Bahkan harga cairan pembersih ikut melambung naik sejak merebaknya wabah COVID-19,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, produksi pembersih tangan tersebut memang hanya diperuntukkan bagi kalangan internal dinas mereka saja, namun jika diminta memproduksi dalam jumlah besar pihaknya siap melakukannya.

“Kalau memproduksi dalam jumlah banyak sebenarnya siap tidak masalah kalau bahannya bisa kita bantu,” katanya. Sedangkan, bahan-bahan yang diperlukan untuk mem-



produksi cairan tersebut terdiri dari etanol, hidrogen peroksida, gliserol, dan amidis.

Adapun proses pembuatan cairan itu memakan waktu sekitar 72 jam dengan cara dididihkan. “Dari empat itu yang tidak ada atau sulit didapat saat ini adalah gliserol. Kita cari di apotik juga tidak ada maknanya kemarin kita gunakan alternatif lain kita ganti dengan

alovera atau lidah buaya,” terangnya.

Ia menambahkan, cairan pembersih produksi mereka dinilai ampuh membunuh bakteri mematikan kuman yang menyebabkan virus.

“Hasilnya lumayan karena memang untuk membuat cairan hand sanitizer bahan-bahannya memang itu jadi sama,” pungkasnya. (ant/3).

Gubernur Berharap Siswa SMK Tetap Semangat Ikuti UN

Tinjau Pelaksanaan UN SMK 2020

PANGKALANBARU - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman berharap, siswa-siswi tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tetap semangat belajar dan mengikuti Ujian Nasional (UN).

Hal itu diungkapkan Gubernur Erzaldi Rosman saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SMK Tahun 2020 di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, Rabu (18/3/2020).

Disampingi Kepala Dinas Pendidikan Babel, M. Soleh, Gubernur Erzaldi Rosman menambatkan, dalam rangka mengantisipasi Virus Corona, Standar Operating System (SOP) dilakukan dalam ujian nasional seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum ujian, menyediakan hand sanitizer, ruang ujian yang disterilkan dengan penyemprotan disinfektan, dan setelah ujian, para siswa didorong oleh para guru agar segera kembali ke rumah dan belajar mempersiapkan ujian untuk hari berikutnya.

"Intinya sekolah tetap melaksanakan ujian nasional, sementara siswa yang tidak ujian tetap belajar di rumah," un-

gkannya. Hari ini, kata Gubernur, para guru juga masuk untuk mempersiapkan atau memberikan tugas kepada siswa-siswa agar tetap belajar di rumah masing-masing.

Gubernur meminta agar orang tua serta masyarakat memahami bersama, dan meminta mereka mengawasi para siswa-siswi yang belajar di rumah, jangan beri peluang untuk anak-anak pergi ke luar rumah sampai dengan waktu yang ditentukan dan dilihat perkembangannya nanti.

Untuk hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kasatpol PP Babel agar segera beroperasi keliling, dimana kedatangan anak-anak sekolah yang berkumpul dan bermain di lokasi publik untuk dibubarkan dan diminta segera pulang ke rumah.

"Ini tanggungjawab kita sama-sama. Tolong orang tua awasi anak-anak. Kepada anak-anak atau siswa-siswi harus paham kenapa kita belajar di rumah ini. Yuk kita disiplin, kalau tidak disiplin kita tidak bisa melawan corona ini dengan baik," ajak Gubernur Erzaldi Rosman.

"Ambil juga hikmahnya, keti-

ka semakin banyak anak-anak bersama orang tua, saya yakin dan percaya hubungan antara orang tua dan anak-anak akan lebih mesra," timpalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Babel, M. Soleh mengatakan, ada delapan provinsi yang melakukan ujian nasional berbasis komputer. Sampai hari ketiga pelaksanaan ujian di Babel berjalan lancar, aman, tertib, dan tidak ada kendala berarti.

Dalam pelaksanaannya juga, lanjut Soleh, disesuaikan dengan SOP atau protokol kesehatan berkenaan Pencegahan Penyebaran Virus Corona dengan mengutamakan tindakan preventif seperti sebelum masuk ruangan disterilkan, para siswa mencuci tangan, alat untuk ujian juga disterilkan, juga panel jendela dan pintu serta tombol-tombol lampu. Selesai ujian ruangan kembali disterilkan untuk sesi berikutnya.

Ujian Nasional Tingkat SMK nanti dilanjutkan dengan ujian sekolah pada tanggal 23 Maret, baik praktik, teori, dan uji kompetensi. Sedangkan tingkat SMA, ujian nasional dilaksanakan tanggal 30 Maret. Pengumuman hasil ujian dilakukan serentak pada tanggal 2 Mei



Gubernur Erzaldi menantau langsung pelaksanaan UN tingkat SMK di SMKN 1 Pangkalanbaru. (foto: istimewa)

bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalanbaru yang ikut

menemani mengatakan, sebanyak 245 peserta mengikuti ujian nasional di SMKN 1 Pangkalanbaru yang dibagi menjadi

dua Sesi. Persiapan telah dilakukan oleh sekolah dengan pengayaan mata pelajaran mulai tiga bulan lalu. Sekolah me-

nergetkan untuk mempertahankan peringkat 10 besar seperti tahun lalu yang berada di peringkat 8 besar. (rel/3)



Peserta Pelatihan Keluarga Sehat Tahun 2020 foto bersama usai pembukaan. (foto: istimewa)

Petugas Pembina Keluarga Harus Dibekali Ilmu yang Cukup

PANGKALPINANG - Dengan memberikan Pelatihan terhadap Petugas Puskesmas se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berharap petugas mampu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, baik promotif dan preventif.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Babel, Mulyono Susanto saat membuka kegiatan Pelatihan Keluarga Sehat Tahun 2020 di BKPSDMD Babel, Rabu (18/03/2020).

"Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, tetapi juga ke luar gedung.

Walaupun bekerja sama dengan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina puskesmas, petugas tetap harus melakukan kunjungan langsung ke

keluarga di wilayah kerjanya," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan upaya kesehatan, integrasi dilakukan oleh petugas pembina keluarga. "Siapa petugas pembina keluarga? Seluruh tenaga kesehatan di puskesmas.

Petugas pembina keluarga harus dibekali ilmu yang cukup terkait dengan program yang ada di puskesmas," jelas Kadis Mulyono Susanto.

"Dari kunjungan rumah sebagai konsep pendekatan keluarga, kita berharap dapat mengumpulkan data profil kesehatan keluarga dan updating pangkalannya," sambungnya.

Saat kunjungan ini, merupakan momen penting petugas untuk melakukan upaya promosi dan preventif.

"Petugas dapat mengedukasi masyarakat mengenai program kesehatan, misalnya saat ini, pencegahan Covid-19 kepada masyarakat,"

legasinya. Sementara itu, Kepala Sumber Daya Manusia Kesehatan, Ratu Zaenab Amin menjelaskan, peserta pelatihan berjumlah 30 orang. "Peserta berasal puskesmas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kecuali Kota Pangkalpinang," katanya.

Langkah awal setelah pelatihan, dilakukan pendataan seluruh keluarga dalam wilayah kerja puskesmas. "Hasil kegiatan ini akan menjadi dasar pembuatan database keluarga sehat dan penghitungan indeks keluarga sehat," terang Ratu.

Kesamaan pandangan dan pedoman dalam penerapan dan pelaksanaan program ini diharapkan dapat menularkan petugas yang berkompoten dan mampu menghasilkan output yang akurat. Kegiatan ini digelar di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari 16 hingga 20 Maret 2020. (rel/3)

Di Jambore Kader Melati Erzaldi: Waspada Terhadap Virus Corona

PANGKALPINANG - Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Melati Erzaldi ingin menjadikan Kegiatan Perlombaan Dasawisma di Babel sebagai kegiatan regulat yang dilakukan secara berkala.

Hal ini merupakan kebanggaan bagi Babel, sebab secara nasional kegiatan pertemuan dan perlombaan seperti ini tidak rutin dilaksanakan, tetapi di Babel rutin dilaksanakan untuk menjaga semangat kinerja para kader posyandu dan anggota dasawisma.

Pertemuan Temu Kader Kesehatan (Jambore Kader) tingkat Provinsi Babel merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan 138 orang peserta dari perwakilan kader tiap Kabupaten/ Kota se-Babel, tahun ini dilaksanakan di Bangka City Hotel Pangkalpinang, Rabu (18/03/2020).

Kegiatan ini dikemas dalam tiga hari pelaksanaan. Di hari pertama, kader mengikuti paparan materi dan ceramah dari narasumber. Selain itu juga disiapkan sesi curahan hati dari para kader hingga diskusi dan tanya jawab bersama narasumber.

Di hari kedua, dilaksanakan berbagai perlombaan seperti Cerdas Cermat, Penyuluhan, Mars Germas, dan Senam Bedincah. Di hari terakhir dilaksanakan pengumuman dan penutupan kegiatan.

Kehadiran Melati Erzaldi selain untuk membuka kegiatan ini secara resmi, juga menyampaikan materi tentang "Peran TP PKK Dalam Pelaksanaan Posyandu dan Dasawisma".

"Selain membina keakraban dan memberikan motivasi kepada sesama kader dalam rangka meningkatkan pelayanan di posyandu, pertemuan ini dilakukan untuk mengupgrade pemahaman mengenai peran dan fungsi posyandu termasuk tugas dan tanggungjawab kader," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Melati Erzaldi juga



Melati Erzaldi berbicara di acara Jambore Kader Kesehatan tingkat Provinsi Babel. (foto: istimewa)

menyampaikan rasa bangganya terhadap para kader yang tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan yang sempat akan dibatalkan karena status kesiapsiagaan di Babel atas penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Diselipkan juga dalam paparan, edukasi mengenai Covid-19 dan langkah-langkah antisipasi penyebaran Virus Corona ini. "Hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Lakukan terus edukasi dan pengawasan kepada masyarakat terkait Virus Corona, sebab kinerja Anggota Dasawisma begitu dekat dengan masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, juga hadir sebagai narasumber adalah perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Babel. (rel/3)

Buka MTQ, Riza: Doakan Kafilah Babel ke Nasional

TOBALI - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bangka Selatan (Babel) Riza Herdavid membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-VIII tahun 2020, Selasa (17/3/2020) tadi malam di Sempang 3 halaman Mapolsek Toboli.

"Dengan mengucapkan Bismillahrahmanrahim, acara MTQ ke delapan tingkat Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020 ini secara resmi saya nyatakan dibuka," kata Riza Herdavid mengawali sambutannya.

Menurut Riza, acara seperti MTQ merupakan kegiatan positif seiring dengan kegiatan Syiar Islam. Karena dapat memberikan dorongan positif bagi kaum muda.

"Anak-anak dan orang tua untuk selalu dekat dengan Allah SWT. Maka semakin jauh dari tindakan-

tindakan amoral, dengan demikian perasaan ingin selalu dekat dengan ajaran nilai-nilai keagamaan," ujarnya.

Kegiatan tersebut tak lain bertujuan untuk menyiapkan calon-calon pemenang yang akan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Bangka Belitung. Yang akan dilaksanakan di Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur nantinya.

"Insya Allah kita doakan bersama agar kafilah kita bisa ke MTQ tingkat Nasional yang akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk itu, seluruh peserta harus mengikuti lomba dengan sebaik-baiknya," seru Riza.

Ia juga berharap pembinaan seni baca Alquran ini terus ditingkatkan seiring dengan berkembangnya

ilmu pengetahuan dan teknologi.

MTQ ini menurutnya adalah momentum melestarikan seni baca Alquran, sehingga diharapkan akan bermunculan qori' dan qori'ah maupun halifz - halifzah yang handal di tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional.

"Mari kita terus kembangkan generasi qurani di Bangka Selatan agar kabupaten kita senantiasa di rahmati Allah, diberikan keberkahan, kemakmuran dan semakin maju. Banyak hal yang dapat kita pelik hikmah dari Alquran. Mari jadikan Alquran sebagai petunjuk dan penuntun kita dalam menjalani hidup, bahkan menjalani roda pemerintahan pun sebaiknya dilandaskan oleh tuntunan yang terdapat dalam Alquran," pungkas Riza. (raw/3)



Foto bersama Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-VIII tahun 2020 dengan Wakil Bupati dan unsur Forkopimda. (foto: dedy)



Stok Bahan Pokok Cukup Hingga Lebaran

JAKARTA - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjamin ketersediaan bahan pokok akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran 2020. Namun, Kemendag menyoroti ketersediaan sejumlah komoditas yakni gula pasir, bawang putih, dan bawang bombay.

Secara umum kondisi pasokan barang kebutuhan pokok untuk masyarakat cukup hingga Puasa dan Lebaran 2020.

Namun demikian, untuk gula, bawang putih dan bawang bombay menjadi perhatian khusus karena stoknya terbatas," kata Mendag saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/3).

Mendag juga menyampaikan, harga kebutuhan pokok hingga 17 Maret 2020 tercatat relatif stabil, kecuali gula pasir yang terjadi kenaikan 20 persen menjadi Rp16.000-Rp17.000 per kilogram (kg) atau lebih tinggi 36 persen dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.500 per kg.

Sedangkan, harga rata-rata

nasional bawang putih saat ini sudah mengalami penurunan, namun masih tinggi dibandingkan bulan lalu, yaitu sekitar Rp42.000 per kg.

Kemudian, harga bawang bombay juga terbilang tidak normal, yakni kenaikannya melebihi 100 persen," ujarnya.

Untuk beras medium, Mendag mengatakan harganya masih relatif stabil, hanya terjadi kenaikan sebesar 0,26 persen dibandingkan bulan lalu.

Menurut Mendag, ketersediaan beras di Perum Badan

Usaha Logistik (Bulog) masih mencukupi, dan Kemendag telah menugaskan Bulog untuk memenuhi ketersediaan pasokan beras dan stabilisasi harga untuk beras medium yang akan dilaksanakan sepanjang 2020.

"Penyaluran ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) beras medium dapat dilakukan melalui distributor besar, atau mitra Bulog, serta ritel modern yang merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)," ujar Mendag. (ant)



Pemerintah Diminta Hentikan Ekspor Konsentrat

JAKARTA - Pemerintah diminta segera menghentikan perizinan terkait ekspor konsentrat tambang dalam rangka meningkatkan nilai tambah pengolahan hasil pertambangan sehingga bisa meningkatkan nilai ekspor sekaligus lebih banyak membuka lapangan kerja di Tanah Air.

"Tetapi (penghentian izin ekspor konsentrat tambang) sebagai upaya merah nilai tambah produk ekspor sekaligus membuka lapangan kerja baru di dalam negeri. Pemerintah harus berani menghentikan ekspor konsentrat tambang," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Rabu (18/3).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan bahwa semuanya sudah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral serta peraturan pemerintah, termasuk mengenai jangka waktu kompensasi dari neraca perdagangan.

La berpendapat bahwa kebijakan penghentian yang selaras dengan UU terkesan tidak serius dilakukan tetapi beberapa kali malah terdapat regulasi yang mengizinkan perpanjangan ekspor konsentrat.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi

tembaga sepanjang 2019 mencapai 176.400 ton, turun dari produksi sepanjang 2018 yang mencapai 250.925 ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Kamis (12/3), menyebutkan penurunan produksi tembaga itu disebabkan karena transisi produksi PT Freeport Indonesia dari open pit (tambang terbuka) menjadi underground (bawah tanah).

"Ini tembaganya mengalami penurunan, saya kira semua tahu Freeport tahun lalu masuk masa transisi dari open pit ke underground. Mudah-mudahan 2020 sudah mulai naik lagi dan nanti 2022 mencapai puncaknya," katanya.

Untuk tahun ini, target produksi tembaga dipatok 291.000 ton. Dalam catatan Kementerian ESDM, selain tembaga, sejumlah komoditas tambang lainnya juga mengalami penurunan produksi. Sebut saja, emas yang juga turun dari 2018 mencapai 134,95 ton menjadi 108,2 ton sehingga tahun ini produksi hanya ditargetkan bisa mencapai 120 ton. Timah, juga mengalami penurunan dari 83.015 ton pada 2018 menjadi 76.100 ribu ton pada 2019. Pada 2020 produksi timah ditargetkan sebesar 70.000 ton. (ant)

Menkeu Siapkan Perpres Bagi BPJS Kesehatan Tangani COVID-19

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden pengganti Perpres Jaminan Kesehatan yang dibatalkan Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian bagi BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam menangani COVID-19.

"Seperti diketahui Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres yang menyebabkan kondisi BPJS (Kesehatan) menjadi tidak pasti dari sisi keuangannya," katanya dalam pemaparan kinerja APBN Februari 2020 melalui konferensi video langsung di Jakarta, Rabu (18/3).

Menteri Keuangan menyebutkan kondisi itu menyebabkan rumah sakit mengalami tekanan besar dalam upaya penanganan pasien virus corona jenis baru atau COVID-19.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan dalam rancangan Peraturan

Presiden (Perpres) itu akan diakomodasi penyelesaian biaya pasien terdampak COVID-19 di rumah sakit melalui BPJS Kesehatan.

"Kementerian Kesehatan sudah ada pos anggarannya namun juga kita melihat tergantung berapa jumlah kasusnya dan bagaimana penanganannya dan BPJS diminta untuk meng-cover sehingga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah mengeluarkan keputusan untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan pasien COVID-19.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya itu ditetapi Menteri Kesehatan



pada 4 Februari 2020.

"Sedang bentuk pembiayaan terkait penanggulangan sebagaimana dimaksud sek-

dua, dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan atau sumber dana lain yang saat

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kedua Kepmenkes tersebut. (ant)



Peneliti: Harga Pangan Naik, Jangan Hambat Izin Impor

JAKARTA - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Felippa Ann Amanta menyatakan bahwa kenaikan harga pangan sejumlah komoditas diharapkan jangan sampai membuat perizinan impor pangan terhambat karena dapat mempersulit upaya menekan harga pangan.

"Minimnya jumlah pasokan di pasaran serta penyebaran virus corona di berbagai negara, termasuk Indonesia, termasuk ke dalam dua faktor tingginya harga komoditas pangan. Namun impor yang diharapkan bisa menstabilkan harga di pasar domestik jangan sampai terhambat regulasi," kata Felippa Ann Amanta dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (18/3).

Felippa menjabarkan bahwa regulasi impor untuk komoditas pangan memang berbeda satu dengan lainnya, tetapi ada beberapa kesamaan yang berhubungan dengan rekomendasi dan izin impor. Untuk dapat impor, importir dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Pengenal Importir (API) harus mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Untuk mendapat SPI, importir wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian setelah memenuhi berbagai persyaratan, seperti bukti kepemilikan gudang berpendingin atau fasilitas lainnya. Untuk beberapa komoditas, importir harus mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setelah transaksi, lanjut Felippa, importir harus mendapatkan Laporan Surveyor mengenai komoditas yang diimpornya sebagai dokumen kelengkapan kepabeanan. Kemudian bila komoditas yang diimpor masuk ke Indonesia, maka komoditas tersebut masih harus melewati pemeriksaan dari BPOM dan bea cukai.

la mengingatkan bahwa semua proses ini dapat berlangsung dalam waktu yang tidak singkat, antara jangka waktu satu hingga tiga bulan.

"Komoditas pangan strategis bahkan membutuhkan persetujuan pemerintah lewat rapat koordinasi atau rapat terbatas, misalnya saja untuk beras atau gula. Proses ini seringkali membuat Indonesia kehilangan momentum dalam mengimpor di saat harga internasional sedang murah. Belum lagi setelah barang sampai, dia

masih harus melewati serangkaian proses pemeriksaan. Padahal stok sudah menipis dan harga di pasar sudah tinggi," jelas Felippa.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah sebaiknya dapat memprediksikan proses penilaian rekomendasi impor, terlebih pada situasi yang terbelang kritis seperti pada saat ini, belum lagi sebentar lagi merupakan periode menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah secara aktif melakukan monitoring atau pengawasan harga dan pasokan pangan secara rutin setiap pekan dalam rangka antisipasi ketersediaan pasokan pangan pokok untuk menghadapi Bencana Nasional COVID-19.

"Kita akan monitor terus. Pangan tidak boleh kurang, itu arahan Presiden," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartono pada Rakortas pembahasan tentang Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan Pokok bulan Maret-Agustus 2020 di Jakarta, Senin (16/2).

Menko Airlangga menjelaskan perkiraan ketersediaan dan kebutuhan beberapa bahan pangan pokok, terutama komoditas beras, jagung, daging sapi/kerbau, gula dan bawang putih dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Saat ini stok beras yang tersebar di gudang Perum Bulog, penggilangan dan pedagang mencapai 3,5 juta ton. Panen raya diperkirakan terjadi bulan Maret, April dan Mei mendatang sehingga pada akhir Mei 2020 akan terdapat stok beras sebesar 7,7 juta ton.

Sementara itu, stok jagung pada akhir Februari 2020 sebesar 661.000 ton dan panen bulan Maret diperkirakan mencapai 6,2 juta ton. Stabilisasi harga gula akan dilaksanakan dengan mendistribusikan gula sejumlah 20.000 ton oleh Perum BULOG dengan harga Rp10.500/kg.

"Selain itu, akan segera direalisasikan penyediaan gula konsumsi sejumlah 150.000 ton oleh BUMN yang ditugaskan," kata Menko Perekonomian.

Terkait ketersediaan bawang putih, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melaporkan pihaknya telah menerbitkan tambahan Persetujuan Impor (PI) sebesar 70.000 ton. Untuk stabilisasi harga daging, Mendag juga akan segera merealisasikan rencana impor daging kerbau sebesar 170.000 ton dan daging sapi sejumlah 120.000 ton. (ant)

RNI Kejar Produksi Masker Dua Juta Lembar

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan bahwa salah satu BUMN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sedang berupaya untuk mengejar memproduksi masker sebanyak dua juta lembar untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

"Produksi masker sebanyak dua juta lembar itu semuanya oleh RNI RNI kerja sama dengan pabrik lokal, jadi RNI order supaya cepat," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Siringulaga melalui video conference di Jakarta, Rabu (18/3).

Saat ini, lanjut dia, RNI sedang memesan bahan baku masker dari India, Perancis, dan China. Namun, pemesanan bahan baku itu sedikit terkendala karena negara itu sedang menerapkan kebijakan lockdown (menutup kota atau negara).

Maka itu, lanjut dia, Kementerian BUMN akan menggunakan skema Government to Government (G2G) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku masker di dalam negeri.

"Sekarang ini kebutuhan alat kesehatan dimana-mana. Jadi

karena kebutuhan dimana-mana hampir semua negara mencari, akhirnya kami akan negosiasi G2G. Jadi kami BUMN sudah kejar betu," katanya. Ia menyampaikan negara-negara itu masih berkenan untuk melakukan impor bahan baku masker ke Indonesia. "Kalau bahan baku, mereka masih oke, asal bukan masker langsung," ucapnya.

Ia menambahkan RNI akan mendistribusikan masker ke PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan pemerintah daerah.

"Kimia Farma akan distribusi ke publik, RNI juga bisa langsung Pemda," katanya. Sebelumnya, RNI menyebut bahan baku lipatan dalam masker yang diimpor dari luar negeri merupakan komponen krusial dalam produksi masker.

"Komponen lipatan dalam, kalau untuk kainnya kita bisa ambil dari produsen lokal, perhalal atau KW pun tidak masalah kalau sedang dalam kondisi darurat atau emergency (lipatan dalam) itu yang tidak bisa kita produksi," ujar Direktur Utama RNI Eko Taufik Wibowo di Jakarta, Jumat (6/3/2020). (ant)

Hipmi Minta Kelonggaran Pembayaran Kredit

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah, khususnya perbankan, bisa membuat kebijakan kelonggaran pembayaran pinjaman kredit di tengah mewabahnya virus corona jenis baru (COVID-19).

Sekjen BPP Hipmi Bagas Adhahrida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, (18/3) mengatakan saat ini banyak pengusaha yang mengeluarkan omzet maupun pendapatan bisnisnya stagnan bahkan menurun. Hal itu terjadi di hampir semua sektor usaha, baik ritel, pariwisata, manufaktur, jasa, infrastruktur, pertambangan dan lain sebagainya. "Penurunan ekonomi ini mulai dirasakan oleh para pengusaha, khususnya anggota Hipmi yang mayoritas masih berskala menengah," katanya.

Untuk itu, Bagas berharap pemerintah memberikan imbuhan kepada perbankan supaya mempertimbangkan kondisi ini, terutama terhadap sejumlah laporan phaknya keuangan pengusaha baik pinjaman maupun pajak.

"Kami mendorong agar perbankan memberi kelonggaran terkait kewajiban bulanan para pengusaha terkait imbas COVID-19," imbuahnya.

Menurut Bagas, sebagian besar pengusaha muda memiliki tanggung jawab cicilan terhadap perbankan. Kredit tersebut merupakan kewajiban yang selama ini dipenuhi.

"Namun karena ada kondisi seperti ini, di mana aktivitas masyarakat keluar rumah dibatasi dalam jangka waktu lama, maka otomatis berdampak di dunia usaha," katanya.

Pendapat senada dikemukakan Ketua Bidang Ekonomi, Pajak dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani, yang mengaku sudah menajaki komunikasi dengan pihak perbankan, "mana pada Selasa (17/3) sejumlah pengurus BPP Hipmi sudah menemui pimpinan Bank Nasional Indonesia (BNI).

"BNI akan memberikan relaksasi kebijakan sehingga bisa menstimulus perekonomian di masa yang kurang positif ini," katanya menceritakan hasil pertemuan dengan salah satu BUMN itu.

"Kami akan minta perbankan bisa lebih mendukung dunia usaha sehingga perekonomian tetap bisa berjalan dengan bagus. Kemudian-kemudian kredit perlu menjadi perhatian pemerintah dan perbankan," pungkasnya. (ant)

BALITONG RESORT

LIST ROOM BALITONG RESORT

SUITE VILLA	Rp. 2.500.000,- / / Nett/ Night (Inclusive Breakfast for 2 Person)
DELUXE VILLA	Rp. 650.000,- / / Nett/ Night (Inclusive Breakfast for 2 Person)

Resort Facilities: Rp. 4.840.000,-
Room Facilities: Rp. 1.210.000,-

RESORT FACILITIES

Restaurant & Cafe • Internet Access • Airport Transportation (Charge)
Meeting Room • Hall for Wedding & Meeting • Laundry • 24-Hour Security

ROOM FACILITIES

Air • Conditioned Room • Television • Interkom • Coffee & Tea Maker
Desk • Wifi • Slippers • Bath Amenities • Room Service
Non-Smoking Room • Beach View Room

BALITONG RESORT
"We Follow Your Dreams"

PT. BALITONG RESORT (PERSERO) Tbk. Jl. Pantai Indah Kapuk 2 No. 100, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 2912 1000 • Fax: (021) 2912 1001 • Email: info@balitongresort.com

227 Orang Indonesia Positif COVID-19



JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto mengatakan terdapat 55 tambahan kasus baru COVID-19 sehingga total pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 di Indonesia menjadi 227 hingga 18 Maret 2020, pukul 12.00 WIB.

"Total keseluruhan sampai sekarang tanggal 18 Maret 2020 pukul 12.00 WIB adalah 227 kasus positif," kata Yurianto dalam jumpa pers

hingga 18 Maret 2020 pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan sebanyak 55 kasus positif COVID-19.

Pada Selasa (17/3), jumlah penderita COVID-19 yang positif ada 172 kasus di seluruh Tanah Air. Terbanyak berasal dari DKI Jakarta.

Sebelumnya, Yurianto mengatakan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 132 rumah sakit rujukan daerah untuk penanganan COVID-19. Bahkan sejumlah rumah sakit milik TNI, Kepolisian RI dan BUMN serta swasta juga siap untuk ikut merawat penderita COVID-19. "Sesuai arahan Presiden bahwa 109 rumah sakit milik TNI, 53 RS Polri 65 RS BUMN sudah siap untuk menerima perawatan penderita COVID-19," kata Yurianto.

Untuk RS Pertamina Jaya, kata dia, sudah mendedikasikan seluruh tempat tidurnya untuk kasus COVID-19.

Dia mengatakan jumlah positif COVID-19 itu hasil penelusuran jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang dibantu Kepolisian dan unsur Pemda setempat. (ant)



Satgas Pangan Upayakan Turunkan Harga Gula

JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, Satgas Pangan saat ini tengah berupaya menurunkan harga gula yang sedang naik di pasaran.

"Yang akan kami perbaiki adalah kenaikan (harga) gula," kata dia, di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (18/3). Kenaikan harga gula di pasaran disebabkan adanya kenaikan permintaan dari konsumen seiring isu penularan Covid-19.

Stok gula untuk DKI Jakarta, kata dia, masih mencukupi hingga Bulan April dan Mei 2020. "Secara umum untuk stok April sampai Mei harusnya ada," katanya.

mengetakan, Satgas Pangan beberapa waktu lalu telah melakukan sidak ke Lampung dan menemukan ada beberapa perusahaan gula yang memiliki stok 75.000 ton hingga 100.000 ton gula. "Kami minta untuk segera menyalurkan stok gula

tersebut ke Jakarta," katanya.

la mengatakan pasokan gula dari Lampung tersebut akan dikirim ke Jakarta secara bertahap.

Tercatat mulai Rabu, sebanyak 33 ribu ton gula dari Lampung akan tiba di Jakarta. "Mulai hari ini akan dikirimkan 33 ribu ton (gula). Untuk memenuhi (kebutuhan gula di Jakarta)," katanya.

Dengan ada tambahan pasokan gula ini, ia berharap harga gula di sejumlah pasar di Jakarta, akan turun dan gula impor juga tak lama lagi akan masuk ke Indonesia.

Tak hanya berupaya memastikan pasokan gula aman, Satgas Pangan juga akan terus memantau pengirman dan pendistribusian gula sampai ke masyarakat. "Kami telusuri hambatan ada di mana, apakah di masalah distribusi ataukah di stoknya yang masih menumpuk yang sengaja disimpan atau masalah perizinan, akan kami cek semua," kata dia. (ant)

Permohonan SIM Internasional Bisa Registrasi Online

BANJARMASIN - Korps Lalu Lintas Polri terus mengembangkan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional yang berlaku di 93 negara di dunia yaitu negara-negara yang mengakui, menandatangani, menyetujui dan meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1968.

Bahkan kini pemohon dari seluruh penjuru nusantara bisa mendaftar hanya melalui registrasi online dengan pembayaran secara cashless alias nontunai.

"Jadi masyarakat di daerah atau luar Jakarta khususnya, sekarang lebih mudah untuk mengurus SIM internasional cukup lewat online," kata Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Andi Aziz Nizar, di Banjarmasin, Rabu (18/3).

Andi menyatakan, pengurusan SIM internasional melalui online disosialisasikan jajarannya agar masyarakat lebih mengetahuinya.

"Kalau seluruh syarat permohonan lengkap, masyarakat

ke Jakarta tinggal foto, 10 sidik jari dan tanda tangan untuk proses cetak SIM. Waktu kedatangan pun dapat disesuaikan tanpa harus antri dan sebagainya di Korlantas Polri Gedung SIM Internasional Jalan Letjen MT Haryono Jakarta Selatan," ujar Andi, didampingi Kasi SIM Ditlantas Polda Kalsel Kompol Dese Yulianto.

Dalam proses permohonannya, Andi menjelaskan, masyarakat wajib mendaftar secara online melalui website sim.korlantas.polri.go.id/sim-internasional dan melakukan pembayaran secara cashless melalui ATM, mobile banking, internet banking atau setor tunai ke bank terdekat.

Adapun untuk biaya PNPB SIM internasional roda dua dan roda empat, SIM baru Rp250 ribu dan perpanjangan Rp225 ribu. "Tidak ada biaya pungutan lain kecuali biaya PNPB tersebut. Untuk masyarakat Kalsel jika ada pertanyaan bisa menghubungi Regident Ditlantas Polda Kalsel Centre di



nomor 08115014140," ujar Andi pula.

Ketika datang ke Korlantas Polri untuk cetak SIM, pemohon menyertakan SIM nasional asli, KTP asli, paspor asli, atau KITAP (kartu izin tinggal tetap) asli khusus WNA serta menunjukkan print atau cap-

ture registrasi online dan bukti pembayaran.

SIM internasional yang berlaku 3 tahun tersebut terdiri dari 13 kategori mulai Kategori A yang diperuntukkan sepeda motor hingga Kategori BE dengan kapasitas kendaraan lebih besar. (ant)



Amnesty Internasional: Lindungi HAM Pekerja Kesehatan

JAKARTA - Amnesty Internasional Indonesia mengimbau pemerintah agar melindungi HAM pekerja kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan penyakit karena virus corona terbaru (COVID-19).

"Pemerintah harus menerbitkan protokol perlindungan yang jelas bagi pekerja kesehatan," Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3).

Usman Hamid mengingatkan pemerintah untuk memastikan dokter, perawat dan semua pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan dan dukungan psikologis.

Selain itu juga peralatan kesehatan yang memadai, termasuk alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan panduan yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) untuk pencegahan dan pengendalian virus corona. "Di lapangan, pelaksanaan protokol ini bermasalah," kata dia.

Para pekerja kesehatan juga berhak atas informasi yang jelas terkait pasien positif terinfeksi virus corona yang sedang ditangani. "Mereka harus diberitahu jika laboratorium mendapati pasien yang baru saja terpapar positif corona agar mereka segera mempersiapkan diri dan menanganinya," kata Usman Hamid.

Sama seperti pasien, tutur Usman Hamid, pekerja kesehatan memiliki hak atas kesehatan yang dijamin Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Hak ini pun telah dijamin dalam UU Hak Asasi Manusia dan UU Kesehatan sehingga negara wajib memastikan terdapat mekanisme yang menjamin dukungan untuk keluarga pekerja kesehatan yang terinfeksi virus itu.

Ada pun hingga 18 Maret 2020 pukul 12.00 WIB, pasien positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 227 kasus, 19 orang di antaranya meninggal dan 11 orang sembuh dan bisa dipulangkan. (ant)

AMOeba FM
105.1fm
RADIO AMOeba
Saluran Tilawah Qur'an dan Kalimat Ikhlas
Pemasangan Iklan : 0811 717 544
Donasi Dakwah
Bank Syariah Mandiri Cab. Pangkalpinang
No. Rekening : 708 - 7547 - 897
a/n. PT. Radio Amuba Indah Suara
Jl. Mangga Raya No. 86 Bukit Baru Pangkalpinang
Streaming : http://live.syaria.net:9300, website: http://radioamoeba.com

UPDATE BERITA ANDA
www.RAKYAT POS.COM
Klik!

Gama Radio FM 102.7 Mhz
"Sarana Informasi, Promosi, Hiburan dan Bisnis"
Ikutilah event off air Radio Gama 102.7 FM
INDIE ASIH GAMA Ajang Band Indie Bangka Belitung Unjuk Kemampuannya
Dengan membayar uang tunai pendaftaran sebesar Rp 200.00 lagu kalian akan diputar di program INDIE ASIH GAMA setiap hari minggu pukul 19.00-21.00 WIB
Segera kirimkan lagu dan profil Band Kalian ke Radio Gama 102.7 FM
Band terfavorit yang paling banyak di request oleh pendengar setiap minggunya akan berkesempatan tampil di SYDNEY FASHION CAFE
Jadi tunggu apalagi... segera kirimkan lagu kalian
Supported by: Rakyat Pos, Sydney Fashion Cafe

ACUNG ALUMINIUM
TERIMA PEMBUATAN
- KACA ALUMINIUM
- KUSEN PINTU/JENDELA
- RAK PIRING/BUFFET TV
- DLL
Jl. Air Kenanga no. 6 (dekat puskesmas Kenanga)
Sungailiat, Telp. 081278485010

RRI Sekali Di Udara Tetap Di Udara
RRI SUNGAILIAT
Prov. Kep. Bangka Belitung
Media PROMOSI terpercaya untuk usaha anda dengan JANGKAUAN TERLUAS di Bangka Belitung
Pre 1 FM 98.4 MHz
Pre 2 FM 101.4 MHz
Pre 3 FM 97.2 MHz
Sungailiat-Pangkalpinang
FM 98.4 AM 1413 Khz
Toboali : FM 90.4 MHz
Mentok : FM 95.4 MHz
Tj. Pandan : FM 95.5 MHz
Manggar : FM 97.2 MHz
Jl. A. Yani Jalar Sungailiat Bangka
Tlp. (0717) 93185-94302, Fax. (0717) 93867

93.1 FM Bangka Tengah
New
Studio New FM, Jl. HM. Nur No. 24 Koba - Bangka Tengah
Marketing : ☎ 0718 - 61623 ☎ 0823 7352 9456
newradio_fm newradio_fm
newradio_music station 51D866C4
Radio Kebanggaan Kita.....

0717 - 435055 ext. 101, 102

Bawaslu Sarankan Perubahan Mekanisme Kampanye Dalam PKPU



JAKARTA - Komisiner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Affiuddin menyarankan perubahan mekanisme kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2020, menyikapi wabah virus corona (COVID-19) yang sudah ditetapkan sebagai darurat nasional. Mekanisme itu, kata Affiuddin, sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Kalau ini mau diatur mumpung PKPU-nya belum diatur bisa kita atur, misalnya dengan menghindari model kampanye tatap muka atau perjumpaan fisik," ujar Affiuddin dalam konferensi pers yang disiarkan secara streaming dari Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu (18/3). Menghindari kontak fisik adalah salah satu protokol kesehatan yang ditetapkan untuk menghindarkan ter-

yang menjadi tantangan sekaligus jalan keluar ketika ketiga tahapan tadi benar-benar dilaksanakan saat masa pembatasan kontak fisik sedang diterapkan untuk menjaga keselamatan publik.

"Intinya, pilkada ini adalah untuk kemanusiaan. Tidak melalui pemilu atau pilkadanya yang kita lihat, tapi kepentingan sisi manusiawi, keselamatan publik harus juga kami pikirkan," kata Affiuddin.

Saat ini Bawaslu merekomendasikan 3 simulasi pilkada, pertama jika situasi membaik petugas memakai masker dan hand sanitizer saat melakukan verifikasi faktual, opsi kedua yaitu pilkada lanjutan dan ketiga pilkada susulan. Bawaslu bersama pemerintah akan kembali membahas opsi mana yang bakal dipilih terkait Pilkada serentak 2020. Terutama untuk memastikan kepastian hukum terkait pilkada lanjutan atau pilkada susulan.

"Tentu pertimbangan beberapa pihak terutama rekomendasi kami akan menjadi latar belakang agar situasi ini bisa dibicarakan, termasuk antisipasi pengaturan kepastian hukumnya juga harus dibicarakan kalau mau mengambil langkah-langkah terkait pembicaraan sebelumnya, yaitu soal penundaan dalam arti pilkada susulan dan pilkada lanjutan sesuai undang-undang," ujar dia. (ant)



Tidak Ada Penundaan Pilkada Dalam UU

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan tidak ada istilah penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Kita kategorikan ini situasi paling baik, semua masih bisa berjalan. Maka, dibutuhkan SOP semacam aturan tambahan terhadap jajaran pengawas dan petugas KPU jika bertatap muka dengan pemilih," katanya.

"Di UU tidak ada istilah penundaan pilkada, UU mengatakan ada namanya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, di Jakarta, Selasa (17/3). Namun, kata dia, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pemilihan lanjutan dan susulan.

Sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan, kata dia, seperti petugas harus membekali diri dengan masker dan "hand sanitizer" untuk keperluan mencuci tangan.

Jika skenario pertama tidak berjalan, kata dia, skenario kedua adalah mekanisme pemilu lanjutan, jika sebagian tahapan pilkada tidak bisa dilakukan, misalnya tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

"Menurut dia, kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemilihan lanjutan dan susulan tertuang dalam Pasal 120-121 UU Pilkada.

Pasal 120 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan."

"Beberapa daerah kan masuk zona merah, seperti Jawa Barat ada Bekasi, Depok, Cirebon, dan Purwakarta, Banten (Kota dan Kabupaten Tangerang, Jateng ada Solo, Kalbar di Pontianak, Manado di Sulut, kemudian Bali dan Yogyakarta," katanya.

Fritz mengatakan untuk melakukan penundaan pilkada dibutuhkan perubahan UU, dan perlu diingat juga proses penundaan membutuhkan tambahan anggaran karena menyangkut masa kerja penyelenggara pemilu yang sudah ditaklukkan.

Pemetaan daerah-daerah tersebut, kata dia, bisa menjadi modal untuk membicarakan strategi secara bersama-sama karena Bawaslu bukan pengambilan keputusan secara "an dikasih".

"Skenario skenario kemungkinan dalam konteks rekomendasi pemilihan lanjutan dan susulan, domain dan peta jallannya harus berdiskusi dengan pemerintah, KPU, Komisi II DPR sebagai satu kesatuan," katanya. (ant)

Anggota Bawaslu Mochammad Affiuddin menjelaskan setidaknya ada tiga skenario yang harus disiapkan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada tahun ini.

"Skenario pertama, Plan A.

Mahfud: Tembagapura Sepenuhnya Sudah Dikuasai Pemerintah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan bahwa situasi Distrik Tembagapura yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua, saat ini sudah sepenuhnya dikuasai pemerintah setelah sempat terjadi baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Tembagapura sekarang sepenuhnya sudah dikuasai pemerintah. Pemerintah telah berhasil menguasai," katanya, di Jakarta, Rabu (18/3). Mahfud menyampaikan

pernyataan tersebut melalui video pressconference yang dikirimkan melalui WhatsApp Grup Kemenko Polhukam.

Mengenai kontak tembak yang masih sering terjadi di Papua, Mahfud mengakui sebagai ulah KKB yang diselesaikan dengan pendekatan keamanan dan ketertiban.

"Oleh sebab itu, ditangani oleh polisi, aparat keamanan, di-follow up-lah. Ada yang sudah ditangkap," katanya.

Artinya, kata dia, pendekatan



pada Sabtu-Minggu (14-15/3) tersebut dikabarkan menewaskan empat anggota KKB. (ant)

keamanan dan ketertiban seperti biasa dilakukan sebagai langkah penegakan hukum, termasuk terhadap tindakan yang dilakukan KKB.

Akan tetapi, Mahfud mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah di Papua tetap mengutamakan pada pendekatan keajahteraan masyarakat.

Sebelumnya, sempat terjadi baku tembak selama dua hari antara aparat keamanan dan KKB di Kali Bua Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Baku tembak yang terjadi



PKS Usul Pemilihan Cawagub DKI Jakarta Diundur

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengusulkan pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta diundur. Perluanya pengunduran waktu terkait persyaratan cawagub Ahmad Riza Patria dan adanya wabah virus corona (COVID-19).

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang juga Panitia Pemilihan (Panlih) Cawagub DKI Jakarta, Achmad Yani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3), menyebutkan, persyaratan yang belum dilengkapi oleh Riza adalah surat keputusan pemberhentian dari instansi terkait, yakni DPR RI.

"Fraksi PKS DPRD DKI, sepakat untuk mengundurkan waktunya terkait hal itu karena surat keputusan pemberhentian Ahmad Riza Patria yang sudah ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Suifmi Dasco Ahmad Dianggr tidak sah," kata Yani.

Surat tersebut dianggap tidak sah, kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu, karena belum ada pemberhentian resmi dari Presiden RI.

Aturan itu tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pasal 240 ayat (3) UU itu menyebutkan "Presiden meresmikan pember-

TEPI: Pilkada Parsial Bukan Pilihan Meski Situasi Darurat COVID-19

JAKARTA - Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemilihan Indonesia Jerry Sumampow mengatakan tidak ada pilihan (opsi) pelaksanaan Pilkada serentak di daerah-daerah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara parsial (sebagian) meski situasi saat ini sedang darurat nasional wabah virus Corona (COVID-19).

Hal itu dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan mereka yang berpikir untuk menunda Pilkada di daerah-daerah tertentu yang terdampak wabah COVID-19 saja, sementara di daerah lain tetap dilanjutkan pemilihannya.

"Saya kira enggak bisa, karena ini kan Pilkada serentak. Jadi harus dilakukan serentak di semua tempat. Kan itu ketentuan Undang-Undangnya. 274 tempat itu harus berlangsung bersamaan," kata Jerry dalam konferensi pers yang disiarkan secara streaming

dari Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (18/3). Oleh karena itu, menurut Jerry, apabila Pilkada di satu daerah diundur pelaksanaannya maka daerah lainnya pun harus mengalami mekanisme serupa agar Pilkada tetap berlangsung secara serentak.

Ia mengatakan pemunduran jadwal Pilkada ada menunda pelaksanaan Pemilihan sudah memenuhi syarat mengingat adanya kondisi darurat nasional wabah COVID-19 yang tak dapat dikendalikan (force majeure).

"Kita memang harus secara serius melakukan penanganan terkait dengan virus Corona ini. Sudah memenuhi syarat menurut saya sekarang ini untuk dikategorikan force majeure karena kejadian itu luar biasa dan tidak terduga," ujar Jerry. Ia menyarankan sebaiknya seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada

2020 dibertentkan dulu sejak sekarang sambil melihat kondisi penanganan wabah COVID-19 itu secepat apa.

Ia membandingkan dengan penanganan COVID-19 di Wuhan dan Korea Selatan. penangan wabah COVID-19 di sana dapat meredakan wabah sampai tiga bulan. Kata pemerintah bisa menangan COVID-19 sama cepatnya seperti Pemerintah China dan Korea Selatan, berarti penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 hanya pada bulan Maret, April dan Mei, kemudian Juni sudah lanjut lagi tahapan Pilkada seperti semula.

Kemudian, 8 Juli tetap bisa dilakukan tahapan penelaan pasangan calon. Sehingga, menurut Jerry, pelaksanaan Pemilihan bisa tetap dilanjutkan sesuai jadwal. "Nah kalau begitu, menurut saya, memang baik kalau KPU memikirkan untuk melakukan penundaan tahapan paling tidak tiga bulan. (ant)

Komisi III: Kapolri Evaluasi Kinerja Polda Sultra

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengevaluasi seluruh jajaran Polda Sulawesi Tenggara terkait kekeliruan informasi yang disampaikan ke publik mengenai kedatangan 49 TKA asal China di Bandar Udara Haluolele, Sulawesi Tenggara, Minggu (15/3).

Dia menilai misinformation seperti itu jelas tidak dibutuhkan di tengah-length keseriusan pemerintah menghadapi perang melawan penyebaran COVID-19 dan bisa mengakibatkan kepanikan baru di masyarakat.

Herman yang merupakan politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menkumham No. 7 tahun 2020 mewajibkan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tiba di Indonesia harus menjalani karantina selama 14 hari.

"Padahal sesuai keterangan Kepala Kantor Perwakilan Kemukiman Sultra, ke-49 TKA asal China itu belum dikarantina," ujarnya.

Karena itu dia mendesak Kapolri mengevaluasi menyeluruh,

terutama di Polda Sulawesi Tenggara dan Kapolri segera membangun koordinasi dan sinergi yang baik dengan jajaran Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM di semua wilayah Republik Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Sebelumnya, video kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluolele, Kendari, Sultra sempat beredar luas di masyarakat.

Kapolida Sultra Brigjen Pol Merdisyan menyebut 49 TKA China yang baru tiba di Bandara Haluolele itu merupakan pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe.

Menurut Kapolda Sultra, para TKA tersebut dari Jakarta untuk memperpanjang visa yang telah habis menyusul larangan keluar masuknya TKA.

Sementara itu, pernyataan Kapolda Sultra tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Sofyan, yang menyatakan 49 TKA itu bukan TKA lama.

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Kementerian Hukum dan HAM sianan pers pada 16 Maret 2020 menyebutkan bahwa 49 TKA tersebut adalah TKA baru yang berasal dari Provinsi Henan, China dan baru tiba di Kendari dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan melakukan transit di Thailand. (ant)

Dampak Penyebaran Virus Corona Terhadap Pembelajaran di Sekolah

Yuli Hendarti, S. Pd
Guru SMA Negeri 1 Pemali, Kab. Bangka, Bangka Belitung



SEKOLAH adalah tempat terjadinya proses belajar mengajar di dalam kelas. Di sana tempat siswa-siswi memperoleh ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran akan lebih berhasil bila bahan pembelajaran tersebut dikemas sedemikian baik, sehingga dapat menarik perhatian semua siswa. Selama ini sekolah adalah rumah kedua bagi siswa, dimana guru

adalah orang tua yang kedua bagi semua murid. Sekolah adalah lembaga yang kita tahu tempat yang bersih, ramah lingkungan, dan nyaman bagi semua siswa. Tapi siapa sangka sekolah yang tadinya adalah rumah kedua bagi siswa, tempat yang nyaman tetapi sekarang dianggap tidak aman lagi bagi seluruh warga sekolah. Hal ini disebabkan karena Virus Corona yang semakin menyebar. Dampak buruk penyebaran yang diakibatkan Virus Corona, ternyata tidak hanya dirasakan oleh negara China, Italia, Korea Selatan, Singapura, dan lain-lain. Indonesia juga termasuk negara yang terkena dampak buruk dari Virus Corona.

Hal ini membuat sebagian warga menjadi khawatir, dan aktivitas diluar rumah pun terpaksa dibatasi. Hal tersebut sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat Republik Indonesia, yang mana sebelumnya untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona, semua warga harus

mengurangi aktivitas diluar rumah, disambut baik oleh pemerintah daerah, seperti halnya yang dilaksanakan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari tingkat SD dan SMP juga merumahkan siswa dari tingkat SD-SMP. Meskipun kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas, harapannya seluruh siswa dapat belajar mandiri di rumah secara online, agar selama di rumah seluruh siswa tidak ketinggalan pelajaran. Kebijakan ini tentunya diharapkan agar tidak terjadi penyebaran Virus Corona di daerah Bangka Belitung.

Kemampuan dan keselamatan peserta didik serta guru dan tenaga kependidikan itu yang lebih utama. Nadiem juga mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan di semua lini pemerintahan daerah serta mitra di kalangan swasta dalam menerapkan metode belajar online atau dalam jaringan (daring). "Kemendikbud siap dengan semua skenario termasuk penerapan bekerja bersama-sama untuk mendorong pembelajaran secara daring untuk para siswa," ujar Mendikbud.

Untuk mendukung itu se-

ma. Kemendikbud telah mengembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis portal dan android bernama Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar dapat diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Beberapa fitur unggulan yang dapat diakses oleh peserta didik dan guru diantaranya Sumber Belajar, Kelas Digital, Laboratorium Maya, dan Bank Soal. Rumah Belajar dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat.

Kemendikbud mengimbau tiap unit satuan pendidikan untuk melaporkan ke dinas pendidikan, dinas kesehatan ataupun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bilamana terjadi ketidakhadiran secara massal para siswa. Lalu berkonsultasi dengan dinas pendidikan atau LL Dikti jika tingkat ketidakhadiran mengganggu proses belajar mengajar. Sehingga akan dicari cara penyelesaiannya. Pihak sekolah juga harus tanggap bilamana ada suatu satuan pendidikan menyediakan makanan bagi para siswanya, maka sudah sepa-

tuhan untuk memasaknya secara matang guna mencegah penyebaran virus Corona dari daging. Diharapkan suatu pendidikan ini menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan lain di satuan pendidikan. Seperti melakukan kunjungan atau studi wisata, perkemahan dan juga bagaimana membatasi tamu.

Dalam surat edaran tersebut menjelaskan mekanisme bagi siswa maupun orang tua siswa yang berpergiliran di negara-negara yang terjangkiti, maka diminta untuk meliburkan diri selama beberapa hari kedepan. Selama di rumah beberapa hari ke depan para siswa-siswi wajib untuk setiap saat memantau kondisi kesehatannya di rumah, tapi aktif juga mendeteksi kesehatan dirinya, baik ke dokter atau ke pusat layanan kesehatan. Jadi, tidak hanya di rumah, namun aktif memeriksakan kesehatan.

Untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona di semua sekolah, diimbau untuk mengaktifkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan

kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Usaha kecil yang dapat dilakukan sekolah adalah agar meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah, semua warga sekolah mencuci tangan lebih sering, tidak kontak langsung dengan sesama siswa misalnya bersalaman, berpelukan, dan lain-lain. Bila ada yang terindikasi terkena Virus Covid-19 agar segera melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi Covid-19. Selain itu, pihak sekolah juga harus memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tisu) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Selain itu, pastikan warga satuan pendidikan menggunakan saranan CTPS (minimal 20 detik) dan penerangan tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya tetap harus konsisten dilaksanakannya. (***)

Penghapusan Ujian Nasional 2021

Oleh: Deffi Pradina

UJIAN Nasional tahun ajaran 2019/2020 dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret sampai akhir April, sesuai yang diumumkan oleh Badan Nasional Standarasi Pendidikan (BNSP). Rencana, Ujian Nasional tingkat SMA/kan dimulai tanggal 16 sampai 19 Maret, sedangkan untuk SMA/MA akan dimulai tanggal 30 Maret sampai 2 April. Untuk jadwal pelajaran yang akan diujikan dalam Ujian Nasional pun sudah di rilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu.

Tidak berbeda dari tahun sebelumnya, Ujian Nasional tahun ini pun berbasis komputer atau yang lebih dikenal dengan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Dimana, sistem pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan tidak menggunakan kertas dan pensil lagi melainkan menggunakan komputer sebagai media ujanannya. Untuk sistem pelaksanaan UNBK sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2014, atau bisa dikatakan sudah berjalan kurang lebih enam tahun.

Pelaksanaan Ujian Nasional sebenarnya adalah bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah guna melihat apakah suatu proses pendidikan itu berjalan dengan baik atau tidak. Jika hasil rata-rata Ujian Nasional dari suatu sekolah itu tinggi, maka proses pendidikan di sekolah itu pun tergolong sukses, pun juga sebaliknya. Namun, Ujian Nasional akan berbeda dalam pandangan siswa maupun orang tua siswa. Mereka beranggapan bahwa sebuah Ujian Nasional adalah tolak ukur kepintaran seseorang. Dengan tingginya nilai Ujian Nasional dari seorang siswa, maka siswa itu dianggap paling pintar dan selalu di elu-elukan. Padahal, sebe-

namnya kepintaran seseorang itu tidak bisa dilihat hanya dari nilai Ujian Nasionalnya saja, melainkan dari aspek-aspek yang lainnya juga.

Seorang siswa yang tidak pandai menghitung dalam matematika bukan berarti dia bodoh, namun ia memiliki kemampuan lain yang bukan di dalam angka-angka matematika. Bisa jadi ia pintar di pelajaran bahasa atau memiliki banyak prestasi di bidang olahraga. Sehingga, penilaian kepintaran seseorang itu sama sekali tak dapat diambil dari nilai Ujian Nasional saja. Untuk itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memutuskan penghapusan Ujian Nasional pada tahun 2021, atau tahun ini adalah tahun terakhir pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia.

Dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, tentu saja banyak pro dan kontranya. Banyak yang tidak setuju dengan keputusan penghapusan Ujian Nasional karena dianggap bermain-main dalam dunia pendidikan yang notabeneja merupakan kebijakan Pemerintah sejak dulu. Namun, banyak juga yang berpendapat sama dan mendukung keputusan penghapusan Ujian Nasional. Penghapusan Ujian Nasional yang dilakukan ini diharapkan dapat memajukan pendidikan Indonesia. Data menunjukkan, Indonesia menempati urutan ke-72 dari 77 negara dalam survei kualitas pendidikan. Hal ini sangat disayangkan karena secara tidak langsung, dunia mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat buruk. Indonesia kalah dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam, malah pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah mereka. Hal ini tidak semerta-merta terjadi karena guru dan siswa saja,

namun dipengaruhinya juga oleh kebijakan pendidikan yang berlaku.

Negara Finlandia contohnya, pendidikan di negara ini menempati urutan pertama sistem pendidikan terbaik di dunia. Padahal, sistem pendidikan mereka sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia yang mengutamakan teori cukup banyak daripada praktiknya. Di Finlandia, pendidikan akan sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing siswa. Mereka tidak dibebani oleh pelajaran-pelajaran yang sama sekali tak dapat mereka kuasai, erka memiliki kebebasan dalam pendidikan. Selain itu juga, Negara Finlandia tidak pernah mengadakan Ujian Nasional seperti yang dilakukan di Indonesia. Dari sini bisa kita lihat, bahwa Ujian Nasional sama sekali tidak berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia dan hendaknya, kita bisa mencontoh negara Finlandia dalam sistem pendidikannya.

Sebenarnya, masih banyak hal yang dipertimbangkan dalam penghapusan Ujian Nasional ini, terlepas dari beberapa fakta yang telah disebutkan. Pertama, melihat dari kemampuan siswa yang berbeda-beda. Ada kalimat, Jangan pernah menyuruh ikan untuk memanjat pohon, ini tepat sekali di baralkan kepada siswa yang berbeda-beda kemampuan. Tidak semua siswa hebat dalam materi esak seperti matematika, fisika atau kimia. Tidak juga semua siswa hebat dalam bahasa, dan olahraga. Kemampuan siswa berbeda-beda, sehingga tak mungkin memaksa siswa untuk memahami semua mata pelajaran.

Kedua, Ujian Nasional menjadi beban untuk siswa, guru serta orang tua. Tidak dielakkan lagi, bahwa Ujian Nasional menjadi beban untuk siswa. Selain

menghadapi Ujian Akhir, mereka juga harus menghadapi Ujian Nasional. Artinya, beban mereka menjadi dua kali lipat untuk mempelajari materi-materi yang diujikan. Beban guru dan orang tua menjadi bertambah, sebab guru harus menyetihkan waktu lebih untuk mengulangi materi yang di ujikan dalam Ujian Nasional. Namun, terkadang menambah waktu belajar untuk mengulangi materi yang diujikan ini tidaklah efektif.

Ketiga, menyebabkan kesenjangan sosial. Pendapat yang terjadi di masyarakat sekarang adalah mereka mengatakan bahwa Ujian Nasional sebagai tolak ukur kepintaran. Sehingga, nilai Ujian Nasional menjadi sangat penting bagi siswa, terlebih untuk orang tua siswa. Hal ini menyebabkan nilai Ujian Nasional anak dapat menjadi bahan pamor. Mereka berlomba-lomba membanggakan anak-anak mereka masing-masing. Sehingga, orang tua siswa dengan nilai Ujian Nasional rendah akan merasa malu.

Keempat, Ujian Nasional tidak lagi menjadi syarat masuk suatu sekolah. Semajak Pemerintah merilis sistem zonasi tahun lalu, maka nilai Ujian Nasional tidak diperlukan lagi dalam syarat masuk sekolah Menengah Pertama, atau Menengah Atas. Sistem zonasi ini adalah sistem penertarikan siswa baru sesuai dengan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah tersebut. Dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, telah di atur tentang sistem zonasi ini dan diharapkan tidak ada lagi anggapan sekolah favorit.

Kelima, Ujian Nasional tidak menjamin suksesnya seseorang. Suksesnya seseorang bukan dilihat dari tingginya nilai Ujian Nasional, melainkan kegigihannya serta kemauannya



dalam meraih kesuksesan. Banyak kasus yang membenarkan hal ini, orang-orang dengan nilai Ujian Nasional rendah dapat sukses melebihi orang-orang dengan nilai Ujian Nasional Tinggi, sebab kesuksesan bukan di nilai dari kemampuan menghitung matematika atau menghafal rumus kimia. Namun kesuksesan didapatkan dengan kerja keras dan pantang menyerah.

Maka dari itu, dengan alasan-alasan tersebut, penghapusan Ujian Nasional menjadi hal yang bagus dalam tatanan sistem pendidikan. Dengan dihapusnya Ujian Nasional ini, diharapkan dapat mengurangi beban siswa dalam belajar serta beban guru dan orang tua. Sehingga siswa dapat lebih mendalami kemampuan yang ia miliki, bukan hanya teori umum saja yang dikuasai melainkan juga pengalaman ilmu tersebut. Kemudian, tidak akan ada kesenjangan

sosial yang terjadi antar orang tua siswa dan antarsiswa, karena sudah tidak adanya nilai Ujian Nasional yang akan dibandingkan.

Disamping itu, penghapusan Ujian Nasional juga diharapkan dapat membawa perubahan baik terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga dapat menjadi lebih baik ke depannya. Tentunya, hal ini juga tidak cukup dalam merubah kualitas sistem pendidikan Indonesia, elemen-elemen lain juga dibutuhkan dalam memajukan sistem pendidikan, yaitu peran guru-guru, siswa dan orang tua. Keempat elemen ini, harus bekerja sama agar di tahun 2024, Indonesia bisa menghasilkan produk-produk terbaik dari sistem pendidikan yang berkualitas.

Mahasiswa Prodi PAI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Babel

Komisaris Utama : Paulus Junanda - **Direktur** : Suherman - **Pemimpin Umum** : Hendra Erwanto - **Pemimpin Redaksi/Pemimpin Perusahaan** : Agus Hendrayadi - **Penanggungjawab** : Agus Hendrayadi - **Redaktur Pelaksana** : M. Rofi S. Redaktur : Ahmad, M. Revi, M. Irfan - **Staf Redaksi Pangkalpinang** : Nurul Kurniasih, Dwi Sadmoko, Roni Bayu, Budi Santato Muridan, Bambang Irawan - **Fotografer** : Roni Bayu - **Biro Kabupaten Sungailiat** : Zuesty Noviyanti (Kepala Biro), Riski, Y. - **Biro Bangka Tengah** : M. Tamimi (Kepala Biro) - **Biro Bangka Selatan** : Dedy Irawan (Kepala Biro) - **Bangka Barat** : Hendra Irawan (Kepala Biro) - **Biro Belitung** : Bastiar Haryanto (Kepala Biro), Dodi Iskandar - **Pracetak** : Adi P. Dian, Handrean, Udin - **Desain Iklan** : Ari - **Manajer Iklan dan Pemasaran** : Desfiarni - **Kabag. Keuangan, Logistik dan Umum** : Susi Riyanti - **Asisten Manajer Iklan dan Pemasaran** : Yanti Octavia - **Percetakan** : Lukman Hakim (Koordinator), Adi, S. Memet, I - **Sirkulasi dan Pemasaran** : Mahtud, Syaifuddin, Zul (Pangkalpinang), Handoko (Bangka), Satika (Belitung) - **Keamanan** : Ramsyah - **Alamat Redaksi dan Perusahaan** : Jl. Sudirman No. 14 Lembawai Kec. Gabek Kota Pangkalpinang - **Telp.** (0717) 435065 & (0717) 432784 **Fax.** (0717) 439829 dan (0717-437744) - **Mobile** : 0812 7120 6956 - **Website** : www.rakyatpos.com - **E-Mail Redaksi** : rapos_grup@yahoo.co.id, rapos_grup@gmail.com - **Email Iklan dan Pemasaran** : iklan_rapos@yahoo.com - **Alamat Biro Bangka** : Jl. Batin Tikal No. 113 Sungailiat (Depan Kantor Polsekrist Sungailiat) **Telp.** (0717) 94797 - **Alamat Biro Belitung** : Jl. Kemuning 12A Tanjungpenned, Tanjungpenned, Belitung **Telp.** (0719) 23434 **E-mail** : rapos_belitung@yahoo.com - **Legal & Penasehat Hukum** : R. Gozali S. Harahap, SH - **Harga Langganan Pangkalpinang** : Rp60.000, /bulan - **Harga Langganan Diluar Pangkalpinang** : Rp70.000, /bulan - **Rekening Bank BCA Cabang Pangkalpinang a.n PT. Rakyat Pos No. Rek. 0410 6579 70 - Alamat Percetakan PT. Rakyat Pos** : Jl. Sudirman No. 14 Lembawai Kec. Gabek Kota Pangkalpinang - **Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan.**

Wartawan RAKYAT POS dilengkapi dengan tanda pengenalan dan tidak diperkenalkan meminta atau menerima apapun dari narasumber atau dari pihak manapun juga



20 Senpi dan 12 Ribu Butir Peluru Disita Polisi



Bupati Kudus Tamzil Dituntut 10 Tahun Bui

SEMARANG - Bupati Nonaktif Kudus M Tamzil dituntut hukuman 10 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten ini.

Jaksa Penuntut Umum Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (18/3), juga menuntut terdakwa dengan denda sebesar Rp250 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Jaksa menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara tersebut, kata dia, terdakwa dinilai terbukti menerima uang yang diterima langsung maupun melalui orang lain tolatnya mencapai Rp3,1 miliar.

Rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan, kata dia, terdakwa terbukti menerima suap dari Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Shofian tolatnya mencapai Rp750 juta.

Dari pemberian Akhmad Shofian yang disampaikan dalam tiga tahap tersebut, kata dia, total uang yang dinikmati terdakwa mencapai Rp525 juta.

"Dari pemberian Akhmad Shofian dengan total Rp750 juta, sebanyak Rp75 juta diterima oleh ajudan bupati Uka Wisnu Sejati, Rp50 juta diterima staf khusus bupati Agoes Soeranto, sehingga uang yang dinikmati terdakwa sebesar Rp525 juta," katanya dalam sidang yang

dipimpin hakim ketua Sulistyono tersebut.

Dalam tuntutananya, jaksa juga menyatakan terdakwa terbukti menerima gratifikasi yang totalnya mencapai Rp2,5 miliar berkaitan dengan kebutuhan pribadi maupun mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

Penerimaan sebanyak itu, kata dia, hanya Rp15 juta yang diterima secara langsung oleh terdakwa. Sementara sisanya, lanjut dia, pemberian uang tersebut diterima melalui orang lain untuk kepentingan terdakwa.

Selain berkaitan dengan mutasi jabatan, kata dia, penerimaan uang tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan terdakwa untuk mengembalikan pinjaman yang digunakannya untuk membiayai pikada.

Salah satu kebutuhan uang oleh terdakwa, ia menjelaskan karena adanya tagihan utang dari pengusaha bus asal Kudus Hariyanto sebesar Rp1,3 miliar.

Menurut Joko, bantahan terdakwa atas berbagai penerimaan uang tersebut harus dikecualikan oleh majelis hakim karena tidak disertai dengan alat bukti yang logis.

Dalam tuntutananya, jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara atas penerimaan yang telah dinikmatinya sebesar Rp3,1 miliar.

Jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.

Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang.(ant)

JAKARTA - Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menyita 20 unit senjata api ilegal dari berbagai jenis dan turut menyita 12 ribu butir dari tangan enam orang tersangka.

"Jadi senjata api keseluruhan yang kita amankan sekitar 20 senjata api dengan peluru sebanyak 12 ribu butir peluru, kemudian tersangka yang kita amankan enam orang," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana di Polda Metro Jaya, Rabu (18/3).

Enam tersangka yang diamankan petugas yakni JR, AK, GTB, WK, MH dan AST. Dijelaskan Irjen Nana, pengungkapan kasus kepemilikan senjata api ilegal ini bermula bermula dari adanya perselisihan antara tersangka AK dan JR dengan korban DH terkait dengan jual beli mobil.

AK dan JR kemudian melakukan penganiayaan terhadap DH dengan menggunakan senpi untuk memukul korban dan menembakannya tepat di samping telinga korban, serta menyundut korban dengan rokok, atas kejadian tersebut korban DH melapor ke Polres Metro Jakarta Barat.

Polres Metro Jakarta Barat kemudian membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut dan pada 29 Januari 2020 sekitar jam 23.30 selaku atas nama AK berhasil ditangkap.

Keterangan dari pengakuan AK menyebutkan bahwa senjata tersebut milik JR, dan pada 30 Januari 2020 JR berhasil ditangkap berikut dua pucuk



senjata api jenis pistol kaliber 9 mm dan pistol revolver kaliber 22 mm.

Setelah diperiksa oleh petugas JR mengaku memiliki senjata api tersebut dari seseorang yang bernialis GTB yang berada di Jakarta Barat.

Polisi kemudian menelusuri informasi tersebut dan meringkus GTB pada 19 Februari 2020, tersangka GTB berhasil ditangkap di rumahnya, di

daerah Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

"Kemudian kami melakukan pengeledahan di Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, di sinilah ditemukan lima senjata api kemudian tiga senapan angin," ujar Nana.

Keterangan dari hasil pemeriksaan GTB menemukan juga barang bukti enam pucuk airsoft gun.

Kemudian yang terakhir ditangkap ada tersangka AST pada 11 Maret 2020. Pada saat ditangkap, petugas turut

menyita 10 unit senjata api pabrik.

Keenam orang yang ditahan dan menyangkut status tersangka lantaran kepemilikan senjata api ilegal.

Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 13 Tahun 1951, Pasal 172 ayat 2 KUHP, Pasal 368 KUHP, Pasal 33 Ayat 2 KUHP dan pasal 335 KUHP dengan ancaman penjara 20 tahun.(ant)

Suap Meikarta Iwa Karniwa Divonis 4 Tahun

BANDUNG - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa oleh majelis hakim divonis empat tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider 1 bulan kurungan karena dinyatakan bersalah atas kasus suap Meikarta.

"Menjatuhkan pidana kepada Iwa Karniwa dengan hukuman selama 4 tahun penjara dengan denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 1 bulan kurungan," kata ketua Majelis Hakim, Daryanto di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Rabu (18/3).

Majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai penghapusan kesalahan bagi Iwa. Sehingga Iwa tetap dinyatakan bersalah meski mantan sekda itu bersikukuh selama persidangan tidak mengakui perbuatannya.

Maka dari itu, hal tersebut dinyatakan sebagai unsur yang memberatkan hukumannya. Selain itu, Iwa juga dianggap tidak membantu upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Terdakwa juga tidak merasa bersalah," kata hakim.

Meski demikian, hakim juga menyebutkan hal-hal yang meringankan bagi hukuman Iwa. Menurut hakim, Iwa dianggap bersikap sopan selama persidangan.

"Terdakwa sudah lama menagahi pegawai negeri sipil selama 34 tahun, sebelum perkara ini terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa juga punya tanggungan keluarga," tuturnya.

Vonis tersebut sesuai dengan dakuwaan kesatu sebagaimana diatur menurut Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya Jaksa menuntut Iwa untuk dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan.(ant)

MEDAN - Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengungkap identitas pembunuh seorang pengemudi ojol online (Ojol) yang jenazahnya ditemukan di Jalan Rahayu Pasar 12 Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu dinihari.

"Dua pelaku berhasil ditangkap, satu meninggal dunia," kata Wakapolresta Bes Medan AKBP Irsan Sinuhaji dalam konferensi pers di Makro Polresta Medan, Rabu (18/3) sore.

Adapun identitas kedua pelaku yakni Ardi Syahputra dan Agung Syahputra, keduanya warga Jalan Hang Tuah Dusun VIII Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Kedua pelaku yang merupakan kakak beradik itu ditangkap personel Polsek Percut Sei Tuan saat melintas di depan Makro Polsek Percut Sei Tuan sesaat setelah melakukan aksinya.

Sebelum penangkapan, para pelaku yang membawa mobil korban sempat melakukan aksi kejar-kejaran dengan istri korban yang saat itu sedang mencari keberadaan korban.

"Saat itu istri korban mencari suaminya dengan menggunakan GPS, karena curiga suaminya belum pulang," katanya.

Tepat di depan Polsek Percut Sei Tuan, istri korban kemudian berteriak sehingga mengundangi perhatian warga yang kemudian memberhentikan mobil tersebut.

Warga yang emosi melihat tindakan pelaku kemudian

menghimpit salah satu pelaku yang bernama Ardi. Selanjutnya petugas langsung mengamankan kedua pelaku.

"Kedua pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Namun, pelaku Ardi meninggal dunia. Sementara pelaku

Agung berikut dengan barang bukti kita amankan untuk diproses hukum," ujarnya.(ant)



Mantan Dirkeu AP II Andra Dituntut 5 Tahun Penjara

JAKARTA - Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II 2015-2019, Andra Yastrialsyah Agussalam, dituntut 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap sekitar Rp1,985 miliar dari Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara.

"Menyatakan, terdakwa Andra Yastrialsyah Agussalam telah bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andra Yastrialsyah Agussalam berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPI Haerudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/3).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua dari pasal 12 huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdapat sejumlah hal yang memberatkan dalam perbuatan

Andra.

"Terdakwa sebagai Direktur Keuangan Angkasa Pura II yang merupakan salah satu BUMN telah mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good governance) dalam menjalankan perusahaannya dan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan untuk melakukan kejahatan, terdakwa terbukti merupakan pelaku aktif dalam melakukan kejahatan, terdakwa berusaha menutupi kejahatan seolah-olah sebagai pembayaran utang piutang, terdakwa tidak mengakui dan tidak menyangkal perbuatannya," tambah jaksa Haerudin.

Sedangkan hal yang meringankan, Andra belum pernah dihukum. Dalam perkara ini Andra dinilai terbukti menerima suap sebesar 717 ribu dolar AS (sekitar Rp988,738 juta) dan 96.700 dolar Singapura (sekitar Rp996,381 juta) sehingga jumlahnya mencapai Rp1,985 miliar dari Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Darman Mappangara.

Tuntutan pemberian uang tersebut adalah agar Andra mengupayakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) menjadi pelaksana pekerjaan dalam pengadaan dan pemasangan Semi-Baggage Handling System (BHS) di Kantor

Cabang PT Angkasa Pura (AP) II antara PT Angkasa Pura Percontong (APP) dan PT INTI.

PT INTI adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Darman Mappangara selaku direktur PT INTI sudah kenal Dirkeu PT AP II Andra Yastrialsyah sejak sama-sama bekerja di PT LEN Industri.

Pada 23 Agustus 2018, Darman memberitahu Andra melalui "whatsapp" bahwa ada rencana kontrak PT INTI melalui PTAPP untuk Semi BHS (mencakup X-Ray) sekitar Rp200 miliar kemudian Andra menyampaikan akan "mengawali" pekerjaan tersebut di tingkat direktori PT AP II.

Pada Mei 2019, Darman Mappangara mengenalkan temannya Andri Taswin Nur kepada Andra yang bertugas membantu Darman untuk urusan administrasi dan keuangan Darman.

Andri Taswin diberitahu Darman mengenai dokumen Proforma Purchase Order yang dikeluarkan oleh PT INTI kepada PT Berkat pada 30 April 2019 untuk pengadaan dan pemasangan conveyer Semi-BHS untuk 6 bandara, yang seolah-olah PT INTI sudah memesan conveyer Semi-BHS kepada PT Berkat serta adanya kewajiban membayar sejumlah uang kepada Andra.

Pada 25 Juli 2019, Darman lalu meminta Andri Taswin untuk menyiapkan uang sebesar Rp2 miliar yang akan diserahkan kepada Andra secara bertahap supaya proses kontrak pekerjaan antara PT INTI dengan PT APP dan pembayaran uang muka dapat terlaksana.

Pada 26 Juli 2019, Andri Taswin menyerahkan uang sebesar 53 ribu dolar AS kepada Andra melalui Supri Darman bernama Andang di Mall Plaza Senayan, Jakarta.

Pada 27 Juli 2019, Andri Taswin menyerahkan uang sebesar 18 ribu dolar AS kepada Andra melalui Endang di lobby Mall Lotte Avenue Kuningan, Jakarta. Uang tersebut sebelumnya ditukarkan Andri Taswin di tempat penarikan Valas di PT Ratumas Valasindo dengan uang sejumlah Rp253,62 juta.

Pada 30 Juli 2019, Darman menghubungi Andra dan menyampaikan akan menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar dan meminta tolong agar uang muka ke PT APP ditambah karena PT INTI membutuhkan uang sekitar Rp16 miliar atau 20 persen dari nilai kontrak PT AP II ke PT APP yang akan digunakan untuk pemesanan barang.

Pada 31 Juli 2019, Darman

memberitahukan Andri Taswin bahwa uang sudah masuk ke rekening Andri Taswin di Bank Mandiri sebesar Rp4,2 miliar dan menyerahkan untuk memberikan uang Rp1 miliar kepada Andra ke dalam mata uang dolar Singapura.

Kemudian Andri Taswin menghubungi Endang untuk menentukan waktu dan tempat menyerahkan uang kepada Andra dengan kalimat "dia harus jemput barang pakainya itu ada di Koksas", selanjutnya disepakati pertemuan di depan Mall Kota Kasablanka Jakarta sekitar pukul 19.00 WIB.

Andri Taswin lalu menukarkan uang sebesar Rp1 miliar menjadi 96.700 dolar Singapura di PT Ratumas Valasindo yang berada di Mall Kota Kasablanka sekitar pukul 19.00 WIB.

Andri Taswin lalu bertemu dengan Endang di Lobi Center Mall Casablanka dan menyerahkan uang sebesar 96.700 dolar Singapura dan tidak berapa lama kemudian keduanya ditangkap oleh petugas KPK.

Atas tuntutan tersebut, Andra akan membacakan nota pembelaan (pledo) pada 30 Maret 2020.

Terkait perkara ini Darman Mappangara sedang divonis 2 tahun penjara sedangkan Andri Taswin divonis 16 bulan penjara.(ant)

EXPRESS BAHARI
Melayani Pelayaran Bangka-Bellung (PP)

Jadwal Pelayaran:
Bangka - Bellung
Pada Hari Minggu, Rabu, Jum'at Jam 13.00 WIB (siang)
Bellung - Bangka
Pada Hari Minggu, Rabu, Jum'at Jam 07.00 WIB (pagi)
HUBUNGI
Pangkalpinang: Hotline (07171) 431818/424222
Bellung: PT. SAKTI INTI MAKMUR
Jl. Jen. Sudirman No. 47 A Tj. Pandan Telp. (0719) 25130 Fax. (0719) 24459

HARGA TIKET

CLASS VIP	Rp. 192.000
CLASS EKE	Rp. 162.000
CLASS VIP	Rp. 354.000
CLASS EKE	Rp. 304.000

Dukcapil Basel Stop Layani Rekam Data,

publik bersentuhan langsung dengan masyarakat," jelasnya saat sosialisasi dan koordinasi pendengaran dan pencegahan Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19) di Balai Daerah, Rabu (18/3/2020).

Tutup Objek Wisata

Terpisah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menutup sementara dua objek wisata di Kecamatan Mentok. Kedua tempat tersebut yakni objek wisata sejarah Bukit Menumbing dan Pantai Batu Rakit. Ditutupnya dua objek wisata itu terutama dalam surat edaran yang diterbitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat tertanggal 18 Maret 2020.

Penutupan dua objek wisata ini berdasarkan surat edaran MenPAN- RB No 19 tahun 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

langan Bencana No. 13/A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. "Memperhatikan hal tersebut, untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona di Kabupaten Bangka Barat, maka kami sebagai pengelola objek wisata Bukit Menumbing dan Pantai Batu Rakit menutup sementara objek wisata tersebut sampai tanggal 30 April 2020," bunyi surat edaran yang ditandatangani Plt Kadisparbud Bangka Barat Bambang Haryo Suseno.

Seperti diberitakan, pada sosialisasi dan koordinasi pendengaran dan pencegahan Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Babel drg Mulyono dalam menyebutkan ada 6 kasus corona di Babel masih dalam pemeriksaan dari 8 total kasus.

Dari hasil pemeriksaan tersebut 2 kasus dinyatakan negatif. Ia juga menjelaskan di Babel saat ini berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan ada 2 rumah sakit rujukan untuk menangani kasus corona yaitu RS Depati Hamzah dan RS Belitung. Mulyono menjelaskan rencananya Gubernur Babel akan menerbitkan surat yang menetapkan bahwa RSUD Basel salah satu rumah sakit yang siap menangani kasus corona. Selain RSUD Basel, RSUD Babar, RSUD Bangka dan RS Provinsi.

"Pertimbangannya adalah karena jarak RSUD Basel dengan RS Pangkalpinang cukup jauh," jelasnya. Sehingga kesiapan tenaga dan spras bertahap harus dipenuhi. Disisi lain, Mulyono juga mengajak masyarakat untuk mencegah masuknya virus corona dengan selalu menjaga kebersihan. "Lakukan Gemas, olahraga

teratur, cek kesehatan jika ada demam" pungkasnya. Sayangnya, usai memberi paparan, Mulyono enggan dikonfirmasi ulang jumlah kasus corona. Menurutnya soal data corona sudah ada bagian tugas gugus yang akan menyampaikannya. "Saya tidak boleh, nanti salah, ada gugus tugasnya yang menyampaikannya, dan tentunya mungkin berbeda karena update," kata Mulyono.

Selain menghadirkan narasumber Kadinkes Babel, acara yang digelar di Balai Daerah Basel Rabu (18/3/2020) juga menghadirkan Kepala KKP Kelas 3 Pangkalpinang Dijen Penegahan dan Pengendalian Penyakit Kementkes RI, dr. Bangun Cahyo Utomo. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Asisten Kesra Sekda Babel H Mulyono. Dalam sosialisasi tersebut, Kadinkes Babel Supriyadi langsung membentuk gugus tugas penanganan kasus corona Basel. (raw/wan/6)

DPRD Setujui Rp25 M Insentif Cegah Corona,

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Babel, Herman Suhadi mengatakan anggaran tersebut memang sudah dibuktikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap penyebaran virus corona. "Bahkan ini kan ada instruksi dari pemerintah pusat baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah provinsi untuk melakukan (langkah-langkah antisipasi) itu, membentuk gugus tugas namanya," tukas Herman.

Tindak Penyebar Hoax

Kapolda Bangka Belitung, Brigjen Pol Kementes RI, dr. Hidayat mendukung penuh kebijakan Gubernur Babel dalam upaya antisipasi penyebaran virus corona. "Kita akan bersinergi dalam mencegah, sebagai bentuk antisipasi serta kesiapan terhadap penyebaran virus corona, kami akan melakukan tindakan tegas kepada pelaku penyebaran hoax atau berita bohong tentang virus ini," tegas Kapolda, Rabu (18/3/2020).

Wujud komitmen ditunjukkan Kapolda dan Gubernur Babel, dengan terbang ke Bangka Selatan menggunakan helikopter dalam rangka memantau kegiatan antisipasi penyebaran virus corona di wilayah Kota Pangkalpinang Kecamatan Lepar Pongok di desa Kumbang.

Kedua pimpinan mininjau langsung aktivitas para personel tim terpadu penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perhubungan, KKP Babel, Polres Bangka Selatan, Posmat TNI AL Sada, Pol PP dan tim lainnya melakukan penyempromatan di ruang tunggu pelayanan informasi

yang dibentuk oleh Walikota Pangkalpinang, ujar Wakil Gugus Tugas Covid-19 Pemko Pangkalpinang, Dokter Masagus Hakim.

"Pria yang baru sepekan menjadi Kepala Dinas Kesehatan Pangkalpinang ini menyebutkan, kehadiran posko itu sebagai tempat khususnya untuk masyarakat yang ingin tahu informasi saat ini tentang virus corona (Covid-19).

"Silahkan cek di posko ini bagi masyarakat akan diberikan edukasi terkait dengan penanganan penanggulangan Covid-19," jelasnya.

Utuk saat ini kata dr Hakim pihaknya masih menyusun atau bisa dibentuk. Untuk ini sekaligus penanganan jika itu adanya kecurigaan seseorang terkena corona.

"Nanti, jika ada seseorang yang mencurigikan akan didatangi oleh tim kesehatan, untuk memastikan dan penanganannya," tukasnya.

Berbagai lainnya juga dilakukan Satgas pencegahan Covid-19 juga melakukan penyempromatan disinfektan di sekolah-sekolah, penyempromatan ini dilakukan bertahap dalam dua hingga tiga hari kedepan.

"Tim terdiri dari BPBD Babel, dan PMI sekarang sudah mulai melakukan penyempromatan ke SMA 1 dan SMA 3 Pangkalpinang," lanjut Kalaka, dr. BPBD Babel, Mikron Antarkas, Rabu (18/3/2020).

Ia menjelaskan titik-titik yang disemprot di sekolah tersebut seperti ruang kelas, ruang guru, tempat-tempat anak bermain, kantin dan toilet.

"Paling utama itu ruang kelas dan ruang guru, itu kita semprot semua, tujuannya agar bekas-bekas sentuhan bersih sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona khususnya di (ruang) pendidikan," ujarnya. (dunia/bum/6)

Musda Golkar Babel Deadlock, Masih Panas,

sebagaimana tuduhan Sekretaris Kogoro Provinsi Babel, Eddy Iskandar.

"Jadi begini, mereka ini ormas pendiri dan didirikan, inikan harus berkoordinasi. Ada PO (Pedoman Organisasi-red) nya ormas itu harus berkoordinasi," terangnya kepada awak media di Kantor DPD I Partai Golkar Babel, Rabu sore (18/3/2020).

Ia menjelaskan, panitia Musda sebelum menyiapkan rancangan tata tertib (Tatib) musda, sedari awal telah meminta surat keputusan (SK) pengurusan ormas-ormas itu kepada DPD I Golkar Babel dengan surat yang jelas. Namun satu pun SK pengurusan ormas tersebut diserahkan pihak ormas kepada pihak DPD, sehingga akibatnya tidak terverifikasi di tingkat DPD I.

"Dibales oleh DPD, tidak ada SK-nya yang diterima dari ormas pendiri dan didirikan ini. Sekarang ini, mari kita jujur dan mengukuri BJP (Bambang Patijaya) adalah pengurus DPD, apa halangnya untuk menyampaikannya SK mereka ke DPD," tuturnya.

Bustami juga secara terang-terangan membeberkan bahwa Eddy Iskandar adalah pengurus DPD I Golkar Babel.

"Apa halangnya untuk (Eddy Iskandar-red) menyampaikannya SK pengurusan mereka kepada DPD. Mari kita bicarajujur dan fair," tandasnya.

Karena tidak adanya SK pengurusan ormas itu ditembuskan ke DPD I, maka Panitia Pengarah memutuskan ormas pendiri dan didirikan di dalam rancangan tatib musda dihilangkan.

"Ini sifatnya di rancangan tatib dan semua orang organisasi sudah tahu kalian mau nulis apapun bisa di rancangan tatib. Nanti, pada saat paripurna, pleno akan kita perjuangkan di paripurna itu," jelas Bustami lagi.

Ohlah sebab itu, dia menambahkan ketika musda dibuka dan baru mau akan memasuki sidang pleno itu, panitia Pengarah menjelaskan apa sebab ormas itu tidak dimasukkan dalam rancangan tatib, setelah muncul beberapa kali instruksi dari Eddy Iskandar yang mengaku keberatan.

"Semua ada ranahnya, ada waktunya dan ada tempatnya. Pada saat sidang dibuka, sebelum paripurna pertama dibuka, Eddy dan pengurus DPP sudah ngotot (mempertanyakan) ormas tidak ada dalam kepesertaan musda dalam rancangan tatib). Kita bersikap, lalu paripurna pertama dimulai," katanya.

Bustami menyatakan, dengan alasan tidak adanya tembusan SK pengurusan ormas-ormas yang disampaikan ke DPD I Golkar Babel itulah, yang dijadikan panitia sebagai tatib yang sifatnya rancangan. Sehingga pihaknya keberatan jika dituding Panitia Pengarah membiarkan peserta untuk mengikuti musda. Jika saja SK pengurusan ormas itu ada di DPD, tentu akan dimasukkan dalam rancangan tatib sebagai kepesertaan musda.

Selubelnya, Sekretaris Kogoro Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar dalam konferensi pers di Sol Marina Hotel Kabupaten Bangka Tengah,

Rabu pagi, menilai ada upaya dari panitia untuk menghilangkan status kepesertaan dari para pemilih suara dalam pelaksanaan Musda V Partai Golkar Babel.

"Kami melihat sejak awal ada upaya dari panitia (SC) untuk menghilangkan status kepesertaan dari para pemilih suara, seperti ormas yang mendirikan Partai Golkar dan ormas yang didirikan Partai Golkar lainnya dengan cara tidak membolehkan peserta dan pemilih suara Musda tersebut untuk registrasi. Serta menghalangi mereka masuk ruang sidang," tuding Eddy yang didampingi Sekretaris DPD II Golkar Bangka, Firmansyahleli, Sekretaris DPD II Golkar Pangkalpinang, Machrizal dan Ketua DPD II Golkar Pangkalpinang Irianto Tahor, serta Ketua DPD II Golkar Belitum, Japri.

Peserta pemilih suara resmi di Musda DPD V Partai Golkar Babel ini baru dizinkan masuk setelah memenuhi sidang pleno kedua, itu pun kata Eddy setelah DPP Golkar menjelaskan AD/ART dan ketentuan juklak dalam pembahasan tatib.

"Bahwa Panitia Musda (SC) melakukan intervensi kepada pimpinan sudang. SC ingin menjadi pemain yang ikut menentukan keputusan dan hasil musda tanpa melibatkan peserta musda yang merupakan pemegang kedaulatan di dalam musda," kata Eddy yang juga tertulis dalam rilisnya.

Ia juga menuding bahwa keributan yang terjadi dilakukan oleh SC dan bukan oleh peserta musda. Mengenal bantahan tidak ada

dukungan ganda dalam rekomendasi bakal calon ketua DPD I Golkar Babel, Bustami juga menjabarkannya. Dalam konfirmasi Rakyat Pos, ia merinci ada tiga DPD kabupaten kota yang memberikan dukungan ganda, dan ormas pendiri tidak mencukupi satu dukungan. Demikian juga ormas yang didirikan tidak mencukupi.

Dukungan yang diberikan peserta musda kepada bakal calon Hendra Apolo menurutnya terdiri dari suara DPD I Golkar Babel, Dewan Pertimbangan DPD I, DPD II Golkar Bangka Tengah, DPD II Golkar Babel dan organisasi sayap yakni AMPG dan KPPG.

"Sedangkan dukungan terhadap Bambang Patijaya yang diverifikasi Panitia Pengarah terdiri dari DPD II Kabupaten Bangka dan DPD Golkar Belitum. Dalam verifikasi yang dilakukan pihaknya, ada tiga rekomendasi dukungan yang tidak sah diberikan peserta musda, baik kepada bakal calon Ketua DPD Golkar Babel, Hendra Apolo maupun Bambang Patijaya (BPJ).

Dukungan ganda itu berasal dari DPD II Golkar Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Belitung, sehingga dianggap tidak sah. Bustami menjelaskan, pihaknya dalam musda hanya menjalankan tugas memverifikasi dukungan peserta terhadap bakal calon Ketua DPD Golkar yang mendaftar, sebagaimana diatur Pasal 38 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Golkar Nomor 2 tahun 2020 tentang Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat Partai Golkar. (bis/1)

berangkat tetapi biaya SPDP dicitarkan, dan ada yang berangkat tetapi tidak melakukan kunjungan kerja. Diketahui, hingga sekarang proses hukum kasus SPDP fiktif yang melibatkan 13 anggota dewan. Dimana mantan Sekretaris Dewan Latif Prabadi tengah menjalani masa persidangan di PN Tipikor Pangkalpinang sebagai terdakwa. Sedangkan terhadap 13 orang anggota dewan DPRD Kota Pangkalpinang masa itu, proses hukum belum dihentikan. (bis/6)

Mantan Bendahara DPRD Kota Balik Penjara,

menerima terduga tersangka dan barang bukti yang diserahkan oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pangkalpinang atas nama tersangka Boedik Wahyudi. Tersangka tersebut diduga melangar Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP," ungkap Ryan.

Budik dalam dugaan Tindak Pidana Perpajakan ini tidak menyetorkan ke kas Negara Pajak PH 21 yang telah

dipotongnya, dengan kerugian negara sebesar Rp.355.496.640," tukasnya.

Selain berdasarkan kasus diumumkan, Budik juga pernah dijerat hukuman pidana dalam kasus korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Pangkalpinang. Budik Wahyudi, divonis 1,5 tahun pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Senin (5/3).

Budik dinyatakan bersalah dalam kasus pencairan SPDP fiktif yang terjadi di Dewan

Perwakilan Daerah Kota Pangkalpinang pada Februari 2017.

Budik ikut ke Jakarta mendampingi kunjungan kerja para anggota dewan dengan SPDP tanggal 6,7, dan 8 Februari 2017. Didapat kabar kunjungan kerja itu diduga fiktif dan negara dirugikan sebesar Rp158 juta.

Sebanyak 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang yang mengambil SPDP tersebut terdiri dari anggota Komisi I, II, dan III DPRD. Modusnya, ada anggota dewan yang tidak

berangkat tetapi biaya SPDP dicitarkan, dan ada yang berangkat tetapi tidak melakukan kunjungan kerja.

Diketahui, hingga sekarang proses hukum kasus SPDP fiktif yang melibatkan 13 anggota dewan. Dimana mantan Sekretaris Dewan Latif Prabadi tengah menjalani masa persidangan di PN Tipikor Pangkalpinang sebagai terdakwa. Sedangkan terhadap 13 orang anggota dewan DPRD Kota Pangkalpinang masa itu, proses hukum belum dihentikan. (bis/6)

Dua Lokasi Pantai Ditemukan Mayat,

(18/03/2020). Berdasarkan keterangan Ibu Ani, korban ditemukan tergeletak dipesisir pantai dengan posisi terlengkap diatas pasir sekira pukul 11.00 WIB.

Saksi dari Ani, ada melihat korban berjalan ke pinggir pantai, kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi Ani melihat bantuan sampai dipinggir pantai itu dan menemukan korban dalam posisi terlengkap wajah menghadap tanah. Setelah itu, saksi meminta tolong kepada masyarakat sekitar untuk menolong korban dan dibawa ke RSUD Bangka Tengah.

Sementara itu, menurut keterangan istri korban, nama Muruti sedang berada di rumah. Korban keluar dari rumah menuju arah pesisir pantai tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB, tetangga cari istri korban mengabarkan bahwa suaminya tersebut terkapar di pesisir pantai. Akhirnya, istri korban mendatangi suaminya dan meminta bantuan kepada warga untuk membawanya ke rumah sakit.

Kapolsek Kota AKP, Dedy Nuary membenarkan adanya penemuan mayat itu. "Ada penemuan mayat, sekarang lagi dalam proses penyelidikan lanjut," pungkasnya, Rabu (18/03/2020).

profesi sebagai penambang," kata Pelaksana Kepala BPBD Bangka, Muhammad Ansoori Muslim yang dikonfirmasi terpisah.

Jasad La Nurdin kemudian dievaluasi ke Puskesmas Beliyaku yang sempat dilakukan pengecekan oleh tim identifikasi Polres Bangka. Usai diidentifikasi, jasad La Nurdin kemudian dibawa ke Sungailiat tempat kerabatnya.

Mayat Dipinggir Pantai Penyakit Sedangkan, mayat Ratmin (65) berdarang desa Penyakit Kecamatan Koba, Bangka Tengah ditemukan dipinggir Pantai Penyakit Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Rabu

(18/03/2020). Berdasarkan keterangan Ibu Ani, korban ditemukan tergeletak dipesisir pantai dengan posisi terlengkap diatas pasir sekira pukul 11.00 WIB.

Saksi dari Ani, ada melihat korban berjalan ke pinggir pantai, kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi Ani melihat bantuan sampai dipinggir pantai itu dan menemukan korban dalam posisi terlengkap wajah menghadap tanah. Setelah itu, saksi meminta tolong kepada masyarakat sekitar untuk menolong korban dan dibawa ke RSUD Bangka Tengah.

Sementara itu, menurut keterangan istri korban, nama Muruti sedang berada di rumah. Korban keluar dari rumah menuju arah pesisir pantai tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB, tetangga cari istri korban mengabarkan bahwa suaminya tersebut terkapar di pesisir pantai. Akhirnya, istri korban mendatangi suaminya dan meminta bantuan kepada warga untuk membawanya ke rumah sakit.

Kapolsek Kota AKP, Dedy Nuary membenarkan adanya penemuan mayat itu. "Ada penemuan mayat, sekarang lagi dalam proses penyelidikan lanjut," pungkasnya, Rabu (18/03/2020).

orang pasien baru. Ini masuknya kemarin (senin) pukul 11.35 WIB, untuk pasien nomor tiga dan nomor empat, namun untuk pasien nomor lima itu masuk pukul 19.00 WIB," ungkap Hendra kepada Rakyat Pos, Selasa (17/03/2020).

Tiga pasien baru ini disebut dengan pasien nomor 03, 04 dan 05. Khusus untuk pasien 03 berjenis kelamin laki-laki dengan usia 25 tahun, pasien 04 berjenis kelamin laki-laki dengan usia 44 tahun, dan pasien nomor 05 berjenis kelamin laki-laki dengan usia 20 tahun.

"Iya saat pasien sudah dipulangkan, pasien 02 itu adalah pasien rujukan Belitung Timur. Status dia juga sudah turun menjadi ODP, ya karena pasien ini semangat terus kondisinya dan sudah dalam pemeriksaan kami selama 24 jam, dan hasilnya baik. Hanya kemarin itu, kami khawatir pasien nomor 02 ini karena ada demam," terang Hendra.

Meski pasien sudah dipulangkan ke rumah, namun pihak RSUD akan tetap melakukan kontrol serta pemeriksaan rutin oleh dokter dan petugas medis. "Jadi walaupun sudah dipulangkan, tetap kami lakukan pengecekan secara rutin. Apalagi pasien 02 itu adalah pasien rujukan Belitung Timur. Status dia juga sudah turun menjadi ODP, ya karena pasien ini semangat terus kondisinya dan sudah dalam pemeriksaan kami selama 24 jam, dan hasilnya baik. Hanya kemarin itu, kami khawatir pasien nomor 02 ini karena ada demam," terang Hendra.

"Tapi setelah di cek semua nya, diduga ciri-ciri seperti itu (suspek virus corona), dan sekarang sudah di isolasi. Jadi yang sekarang ada di ruangan isolasi, semua ada 4 pasien, dan semua ada PDP," ungkapnya.

Hendra menjelaskan bahwa pasien dengan status PDP dan ODP, tentu mengalami perbedaan. Untuk pasien seperti ini, belum bisa dipastikan positif terjangkit wabah virus corona dan negatif.

"Kalau untuk PDP ini, sudah

ada gejala klinis seperti demam, batuk, sesak (senin) pukul 11.35 WIB, untuk pasien nomor tiga dan nomor empat, namun untuk pasien nomor lima itu masuk pukul 19.00 WIB," ungkap Hendra kepada Rakyat Pos, Selasa (17/03/2020).

Tiga pasien baru ini disebut dengan pasien nomor 03, 04 dan 05. Khusus untuk pasien 03 berjenis kelamin laki-laki dengan usia 25 tahun, pasien 04 berjenis kelamin laki-laki dengan usia 44 tahun, dan pasien nomor 05 berjenis kelamin laki-laki dengan usia 20 tahun.

"Iya saat pasien sudah dipulangkan, pasien 02 itu adalah pasien rujukan Belitung Timur. Status dia juga sudah turun menjadi ODP, ya karena pasien ini semangat terus kondisinya dan sudah dalam pemeriksaan kami selama 24 jam, dan hasilnya baik. Hanya kemarin itu, kami khawatir pasien nomor 02 ini karena ada demam," terang Hendra.

"Tapi setelah di cek semua nya, diduga ciri-ciri seperti itu (suspek virus corona), dan sekarang sudah di isolasi. Jadi yang sekarang ada di ruangan isolasi, semua ada 4 pasien, dan semua ada PDP," ungkapnya.

Hendra menjelaskan bahwa pasien dengan status PDP dan ODP, tentu mengalami perbedaan. Untuk pasien seperti ini, belum bisa dipastikan positif terjangkit wabah virus corona dan negatif.

"Kalau untuk PDP ini, sudah

Selain 10 PDP, juga terdapat 9 orang dalam pemantauan (ODP) selama masa 14 hari.

Sekda menjelaskan, pasien ini, memeriksa diri ke rumah sakit, karena mengalami gejala seperti Corona, dan memiliki riwayat berdekatan maupun bersentuhan dengan orang dari daerah yang sudah terkena. Sehingga, melakukan pemeriksaan untuk memastikan dirinya.

"Mereka bukan terkena, mereka memeriksa kan diri,"

Karena mereka bersentuhan, atau berdekatan, karena mereka dapat informasi di berita kalau bersalaman dapat tertular, jadi ada yang memeriksa melakukan pencegahan dini terhadap diri pribadi dan mendatangi rumah sakit," jelasnya.

Pemprov kota dia, terus melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini, termasuk menunda beberapa agenda yang akan dilaksanakan, seperti besok (hari ini-red), sekitar 8 agenda Pemprov ditunda, agenda ini berkaitan dengan berkumpunya banyak orang, sehingga dilakukan penunda sebagai bagian dari Social Distancing.

"Iya, kita tunda dulu, mudah-mudahan Covid-19 ini tidak masuk ke Babel," harapnya.

Disamping anggaran yang disetujui DPRD Babel, Naziatu menyebutkan memang anggaran yang disetujui sebesar Rp 25 Miliar.

"Rp6 kemarin waktu itu ambil dari dana darurat, setelah kita pelajari sesuai dengan Perda dan Peraturan Menteri belum bisa digunakan karena belum masuk bencana alam, jadi ketimbang harus merubah perda, ada alternatif yang bisa kita pakai dana insentif daerah (DID) dan dana alokasi khusus (DAK), sehingga tidak perlu melakukan terhadap perda," jelasnya.

Dengan dana ini, ia berharap bisa melakukan di dalam melakukan antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 ini.

Utuk berdinis ke luar daerah, Sekda menegaskan tidak akan memberikan izin kepada ASN yang dinas hanya untuk konsultasi, koordinasi dan sosialisasi. (yan/nov/6)